

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERTAMBANGAN  
BATUAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI  
MASYARAKAT DESA GUNUNG WETAN  
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:**

**SEFIANA GIANSI  
NIM.1423203118**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Sefiana Giansi  
NIM : 1423203118  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATUAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA GUNUNG WETAN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

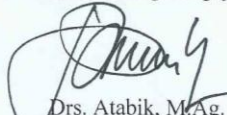
## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATUAN  
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA GUNUNG WETAN  
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudari **Sefiana Giansi NIM. 1423203118** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syaria'h** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa**, tanggal **07 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

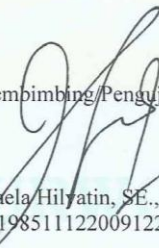
Ketua Sidang/Penguji

  
Drs. Atabik, M.Ag.  
NIP. 196512051993031004

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Rahmini Hadi, M.Si.  
NIP. 197012242005012001

Pembimbing/Penguji

  
Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I.  
NIP. 198511122009122007

Purwokerto,                    Agustus 2018  
Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan

  
Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.  
NIP. 196804031994031004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Sefiana Giansi, NIM: 1423203118 yang berjudul :

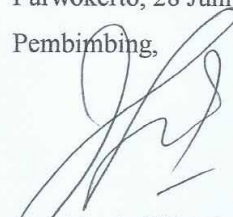
**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATUAN  
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA  
GUNUNG WETAN KECAMATAN JATILAWANG  
KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Juni 2018

Pembimbing,



Dewi Laela Hilyatin, SE, M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007

## MOTTO

*“Orang-orang yang membuat anda tertawa, yang membantu anda ketika anda Membutuhkannya. Orang-orang yang benar-benar peduli. Mereka adalah orang-orang layak disimpan dalam hidup anda. Orang lain hanya lewat.”*

*(Karl Mark 1818-1883)*



**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATUAN  
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA  
GUNUNG WETAN KECAMATAN JATILAWANG  
KABUPATEN BANYUMAS**

**Sefiana Giansi**

**NIM. 1423203118**

Email: [sefiana79giansi@gmail.com](mailto:sefiana79giansi@gmail.com)

Jurusan Ekonomi Syaria'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Meningkatnya kebutuhan akan bahan galian tambang, dan ketersediaannya di alam, membuat masyarakat semakin paham tentang manfaat dan nilai ekonomi dari suatu komoditas tambang, khususnya tambang bahan galian batuan. Pengelolaan sumber daya yang bernilai tinggi dan dibutuhkan banyak orang memerlukan pengaturan untuk menghindari terjadinya perilaku pemanfaatan yang berlebihan dan persaingan yang tidak sehat dalam merebutkan akses pada sumber daya. Oleh karena itu, kebijakan pertambangan sangat diperlukan untuk menghindari suatu eksploitasi sumber daya alam (mineral) yang berlebihan. Dengan adanya kebijakan pertambangan, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengizinkan Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang menjadi salah satu daerah dari beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas yang memiliki pertambangan. Pertambangan galian batuan di Desa Gunung Wetan masih dibuka dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana dampak kebijakan pertambangan batuan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pertambangan batuan di desa yaitu terjadinya perubahan pada mata pencaharian masyarakat desa Gunung Wetan dari sektor pertanian khususnya para buruh tani ke sektor pertambangan dan pengangguran usia produktif di desa Gunung Wetan dapat bekerja di sektor pertambangan. Pertambangan juga menjadi peluang usaha bagi masyarakat di desa. Terjadinya mobilitas pada masyarakat Gunung Wetan dalam bidang pekerjaannya yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan dan merubah taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Perubahan pola perilaku pada masyarakat baik positif maupun negatif juga terjadi pada masyarakat desa Gunung Wetan, seperti konflik, kesenjangan pendapatan, kesejahteraan yang tidak merata, ketidakseimbangan alam pasca tambang, dan krisis air.

Kata Kunci: Kebijakan Pertambangan Batuan, Kondisi Sosial Ekonomi

**IMPACT ANALYSIS OF THE ROCK MINING POLICY ON THE SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF GUNUNGWETAN IS COMMUNITY IN THE SUB DISTRICT JATILAWANG BANYUMAS DISTRICT**

**Sefiana Giansi**

**NIM. 1423203118**

Email: [sefiana79giansi@gmail.com](mailto:sefiana79giansi@gmail.com)

Department of Islamic Economics Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

**ABSTRACT**

Increasing demand for mining materials and its availability in nature, make people getting to know the benefits and the economic value of a mining commodity, especially rocks mining. Management of valuable resources and needed by many people require arrangements to avoid excessive use of behavior and unhealthy competition in seizing access to resources. Therefore, mining policy is necessary to avoid an excessive exploitation of natural resources (mineral). With the mining policy, The Banyumas government is Gunung Wetan Jatilawang to be one the regions from the several districts in Banyumas district that have mining. Rock mining in Gunung Wetan is Village still open and it's expected to improve the economic community.

The aim of this study to know how the impact of rock mining policy on the socio-economic condition of gunungwetan is community in the Sub district Jatilawang Banyumas district. The research is a field research with qualitative research type. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. Data analysis technique used is qualitative descriptive analysis, consisting of three activity flow that is data reduction, data presentation and conclusion.

The result showed that impact of the rock mining policy in the village namely the change of livelihood of rural Gunung Wetan communities from the agricultural sector, especially agricultural laborers to the mining sector and unemployment in productive age in Gunung Wetan is village can work in the mining sector. The mining is also become a business opportunity in the village. The occurrence of mobility in Gunung Wetan is society in the field of work that causing an increase in income and change the standard of living to be better. Changes in behavior patterns in both positive and negative also occur in community of Gunung Wetan is village, such as conflict, income gap, unequal welfare, post-mining natural imbalances and water crisis.

Keywords: Rock Mining Policy, Socio- Economic Conditions



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge



ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*      يَذْهَبُ -*yažhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*      سَأَلَ -*su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُ...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

## 7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur atas karunia Allah SWT, dengan segenap cinta dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Bapak dan Ibu penulis (Bapak Satam dan Ibu Sarnah) tercinta yang selalu memberikan doa dan materi kepada setiap langkah penulis serta selalu memberi motivasi dan dukungan yang besar kepada penulis. Tak ketinggalan lagi kepada adik-adik penulis (Nugi Priyansyah, Dani Pandhu Iryansyah, Lisa Fiana, Sabrina Banyu Ziyansi) yang telah memberikan dukungannya kepada penulis dan selalu menemani, menyemangati serta selalu memberikan senyuman kepada penulis saat suka maupun duka. Tak lupa pula motivator tercinta Syukur Anjar Priyanto yang selalu memotivasi dan menjadikan penyemangat yang luar biasa dalam penulisan skripsi ini. Serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan sahabat-sahabat penulis terutama Ekonomi Syariah C angkatan 2014 yang telah berjuang bersama. Sukses untuk semua!



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi kekuatan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya. Karena hanya kepada-Nya lah kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat pada raja alam semesta Allah SWT.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, *tabi'in* dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusun sampaikan tulus terima kasih yang mendalam kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Supriyanto, Lc. M.S.I., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E, M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto serta selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ungkapkan dalam doa atas segala bimbingan, arahan,

masukannya, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan Ibu, amin.

7. Chandra Warsito. S.TP. M.Si., Penasehat Akademik Jurusan Ekonomi Syari'ah C angkatan 2014 terima kasih atas kebersamaan, bimbingan serta nasehatnya dalam keberlangsungan studi.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Alief Budiono, M.Pd., selaku pembina ADIKSI IAIN Purwokerto yang selalu mengarahkan dan memotivasi penulis.
11. Seluruh staff Perpustakaan IAIN Purwokerto dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas.
12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.
13. Kepada Bapak Kidam selaku kepala Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin dan memberikan informasi terkait pertambangan di Desa Gunung Wetan.
14. Kepada Bapak Sundiarjo Naswin selaku pengusaha tambang yang telah memberikan izin dan informasi atas usaha pertambangan di Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang yang sangat membantu penulis dalam kepenulisan karya ini.
15. Orang tua penyusun, Ayahanda terhebat Satam dan Ibunda tersabar Sarnah yang penyusun sayangi, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doanya yang selalu menguatkan semangat dan keyakinan kepada penyusun. Jasanya tak dapat dibalaskan oleh penyusun dengan apapun, semoga ayahanda dan ibunda tetap berada dalam lindungan, kasih sayang dan kemuliaan dari Allah SWT.
16. Terimakasih kepada adik-adik penulis Nugi Priyansyah, Dani Pandhu Iryansyah, Lisafiana, Sabrina Banyu Ziyansi yang telah memberikan



semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Allah memuliakan adik-adik penyusun dan tetap dalam lindungan Allah SWT dalam mencapai segala hal dan kesuksesan di dunia maupun di akherat.

17. Terimakasih kepada Partner Penyusun Syukur Anjar Priyanto yang selalu menemani, memotivasi dan menguatkan penyusun dalam menyusun karya ini. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan segala yang diinginkan terwujud. aamiin
18. Kawan-kawan seperjuangan ADIKSI 2014, dan teman-teman Jurusan Ekonomi Syari'ah C angkatan 2014, terima kasih atas kebersamaan kita dalam suka maupun duka untuk dapat menyelesaikan skripsi di semester ini, semoga tak akan pernah terlupakan.
19. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Tak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya untaian doa, semoga segala apa pun bantuan yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapat balasan dan imbalan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Purwokerto, 28 Juni 2018

IAIN PURWOKERTO



Sefiana Giansi

1423203118

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan & Manfaat Penelitian .....	11
D. Kajian Pustaka .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Dampak Kebijakan Pertambangan .....	19
1. Dampak Kebijakan .....	19
2. Kebijakan Pertambangan.....	21
3. Dampak Kebijakan Pertambangan .....	24
B. Kondisi Sosial Ekonomi .....	26
1. Konsep Kondisi Sosial Ekonomi .....	26
2. Aspek Kondisi Sosial Ekonomi.....	31
3. Lapisan Kondisi Sosial Ekonomi .....	32
4. Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi .....	34

C. Landasan Teologis .....	36
1. Kebijakan Pertambangan .....	36
2. Kondisi Sosial Ekonomi .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
D. Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Alat Keabsahan Data (Triangulasi) .....	47
G. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Gunung Wetan .....	50
1. Letak Geografis dan Potensi Desa Gunung Wetan.....	50
2. Letak dan Jumlah Pertambangan Batuan .....	53
3. Keadaan Demografis .....	53
B. Hasil Penelitian.....	56
1. Kebijakan Pertambangan Batuan .....	56
2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Wetan.....	65
3. Dampak Kebijakan Pertambangan Batuan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Wetan.....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Perusahaan Pertambangan Batuan di Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas .....	4
Tabel 2	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Wetan .....	7
Tabel 3	Rincian Realisasi Dana Pemasukan Pajak Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan .....	9
Tabel 4	Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 5	Mata Pencaharian Penduduk Desa Gunung Wetan .....	54
Tabel 6	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gunung Wetan .....	55
Tabel 7	Biaya Persiapan Pembukaan Lahan Tambang .....	61
Tabel 8	Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Gunung Wetan .....	70
Tabel 9	Status Kepemilikan Masyarakat Desa Gunung Wetan .....	72
Tabel 10	Jenis Tempat Tinggal Masyarakat Desa Gunung Wetan .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema Penjualan Hasil Tambang.....	64
Gambar 2	Masyarakat Petani Desa Gunung Wetan .....	66
Gambar 3	Operasi Pertambangan Batuan Di Desa Gunung Wetan.....	76
Gambar 4	Lahan Pasca Tambang Di Desa Gunung Wetan.....	77
Gambar 5	Aliran Sungai Kecil di Pertambangan Batuan.....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Pengumpulan Data
- Lampiran 2 Daftar Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Daftar Nama Responden Pekerja Tambang
- Lampiran 4 Permohonan Riset Individual
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 8 Permohonan Izin Observasi Pendahuluan
- Lampiran 9 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 10 Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 Rekomendasi Seminar Proposal
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 13 Berita Acara Seminar
- Lampiran 14 Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 15 Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 16 Surat Keterangan Wakaf Buku
- Lampiran 17 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 18 Sertifikat PPL
- Lampiran 19 Sertifikat OPAK
- Lampiran 20 Sertifikat KKN
- Lampiran 21 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 22 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 23 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 24 Daftar Riwayat Hidup

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber dayanya, baik itu sumber daya yang dapat diperbaharui maupun sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Manusia sangat berperan penting dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam demi menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam pandangan Islam, Allah menjadikan segala yang ada di bumi untuk manusia, seperti dalam (QS. Al- Baqarah: 29).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ  
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

... “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu...”<sup>1</sup>

Allah juga menjadikan bumi sebagai sumber penghidupan (QS. Al- A’raf: 10).

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا ۗ مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

... “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur...”<sup>2</sup>

Salah satu kekayaan yang melimpah adalah sumber daya mineral yang sangat beragam dan dijadikan sebagai komoditas tambang. Jenis-jenis sumber daya mineral dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun

---

<sup>1</sup> Naf’an, *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 27.

<sup>2</sup> Naf’an, *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah...*, hlm. 27.



2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas telah ditentukan lima golongan komoditas tambang dan masing-masing komoditas itu dibagi dalam beberapa golongan yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara.<sup>3</sup> Kabupaten Banyumas memiliki berbagai sumber daya mineral khususnya sumber daya batuan yang tersebar di berbagai kecamatan. Menurut data survei lapangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas tahun 2016, potensi sumber daya batuan yang tersebar di kabupaten Banyumas meliputi : Basalt, Sirtu, Andesit, Granodlorit, Batukapur, Lempung, dan Breksi Andesit.<sup>4</sup>

Meningkatnya kebutuhan akan bahan galian tambang, dan ketersediaannya di alam, membuat masyarakat semakin paham tentang manfaat dan nilai ekonomi dari suatu komoditas tambang, khususnya tambang galian batuan. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bahan galian ini merupakan perusahaan dengan skala usaha kecil hingga menengah. Penambangan batuan yang dilakukan oleh masyarakat desa Gunung Wetan merupakan penambangan skala usaha kecil atau termasuk dalam penambangan rakyat.

Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Luas wilayah yang terbatas mengandung makna bahwa pemegang Izin Pertambangan Rakyat hanya dapat diberikan pada wilayah penambangan yang tidak begitu luas yaitu dengan luas wilayah antara satu sampai sepuluh hektar. Investasi yang terbatas, artinya bahwa modal yang dimiliki oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat tidak terlalu banyak. Jenis kegiatan pertambangan rakyat meliputi pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan dan pertambangan batubara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 48.

<sup>4</sup> Data Survei Lapangan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.

<sup>5</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 90-93.

William Tordoff dan Raul P. De Guzman, mengungkapkan tentang bagaimana keberhasilan pelaksanaan dari suatu program tidak dapat dipisahkan dari adanya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan pencapaian sasaran dari program yang dijalankan.<sup>6</sup> Pengelolaan sumber daya yang bernilai tinggi dan dibutuhkan banyak orang memerlukan pengaturan untuk menghindari terjadinya perilaku pemanfaatan yang berlebihan dan persaingan yang tidak sehat dalam merebutkan akses pada sumber daya. Oleh karena itu, kebijakan pertambangan sangat diperlukan untuk menghindari suatu eksploitasi sumber daya alam (mineral) yang berlebihan.

Islamy mengatakan bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. "Policy" diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan "wisdom" yaitu kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya.<sup>7</sup> Tidak selamanya kebijakan tersebut menjadi sebuah aturan, tetapi dapat saja menjadi sebuah kebijaksanaan dari pemberi kebijakan untuk pertimbangan yang lebih jauh lagi. Seperti halnya pada era ini, pemerintah daerah diberikan peran yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan. Transfer sebagian kekuasaan, dari pemerintahan pusat ke pemerintahan lokal, dilakukan dalam rangka memudahkan pemerintah merespon segala kebutuhan rakyat di tingkat lokal. Pemerintah lokal khususnya pemerintah desa Gunung Wetan menggunakan wewenang tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya, yaitu dengan cara mengizinkan pembukaan lahan pertambangan untuk siapa saja jika lahan tersebut berpotensi memiliki mineral tambang.

Kebijakan Pemerintah Pusat hanya memberikan aturan tertulis, dan keseluruhan wewenang lainnya diatur sendiri oleh masyarakatnya. Hal ini

---

<sup>6</sup> Abdul Bashith, *Ekonomi Masyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2012), hlm. 38.

<sup>7</sup> Samuel Risal dan DB. Paranoan, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman", *eJournal Administrative Reform*, ISSN 0000-0000, 2013, 1 (1): 117-131.

sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur sendiri di dalam masyarakat, terutama penduduk setempat diberi ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan. Masyarakat mendapat pembagian keuntungan hasil eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar dari pemerintah pusat, maka diharapkan masyarakat semakin berdaya dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Salah satu kebijakan pemerintah pusat pada sektor pertambangan adalah memberikan batasan waktu izin usaha pertambangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya mineral yang berlebihan demi terciptanya ekosistem yang seimbang.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas mencatat tujuh perusahaan pertambangan batuan di Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**  
**Daftar Perusahaan Pertambangan Batuan**  
**Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Tahun 2006-2009**

No	Nama Pemegang SIBID	Alamat	Jenis SIPD/ Bahan Galian	Luas/ Produksi (m <sup>3</sup> )	No. SIPD	Tgl SIPD	Waktu (Thn)
1	Kirno Kartam	Desa Gunung Wetan RT 06/04	Batu Andesit	3.850 m <sup>2</sup>	503/33 2/ 2006	13/03/ 2006 sampai 12/03/ 2009	3
2	Kalam	Desa Gunung Wetan RT 06/04	Batu Andesit	3.350 m <sup>2</sup>	503/33 3/ 2006	13/03/ 2006 sampai 12/03/ 2009	3
3	Karmidun Hadi Suparno	Desa Keleng RT 01/01 Kec. Kesugiha	Batu Gunung	10.000 m <sup>2</sup>	503/19 4/ KPPI/ 2006	26/07/ 2006 sampai 26/07/ 2009	3

		n					
4	Naswin	Desa Gunung Wetan RT 03/04	Batu Andesit	4.200 m <sup>2</sup> / 150 m <sup>3</sup> / bln	503/33 8/ KPPI/ 2008	16/05/ 2008 sampai 15/05/ 2009	1
5	Kunto	Desa Gunung Wetan RT 06/04	Batu Andesit	5.205 m <sup>2</sup> / 75 m <sup>3</sup> / bln	503/33 9/ KKPI/ 2008	16/05/ 2008 sampai 15/05/ 2009	1
6	Kartono	Desa Gunung Wetan RT 03/04	Batu Andesit	10.000 m <sup>2</sup> / 150 m <sup>3</sup> /bln	503/34 0/ KPPI/ 2008	16/h05/ 2008 sampai 15/05/ 2009	1
7	H.M. Karnoto	Jl.Candra yuda RT 01/06 Pesanggrahan	Batu Andesit	10.000 m <sup>2</sup> / 150 m <sup>3</sup> /bln	503/61 1/ KKPI/ 2008	09/06/ 2008 sampai 08/06/ 2009	1

Sumber: Olahan Data Sekunder Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas

Untuk saat ini, hanya terdapat dua pertambangan di desa Gunung Wetan, yaitu pertambangan UD. Naga Liar milik Sundiarjo Naswin dengan nomor IUP 543/3/2886/Tahun 2016 disahkan pada tanggal 15 April 2016 dengan jangka waktu tiga tahun, jenis pertambangannya adalah mineral batuan (basalt) dengan luas lahan 10 Ha dan pertambangan milik Kartono dengan nomor IUP 543.32/12551/2017 disahkan pada tanggal 22 November 2017 dengan jangka waktu 2,5 tahun, jenis pertambangannya adalah batuan (basalt) dengan luas lahan 5 Ha. Dengan adanya kebijakan pertambangan, desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang menjadi salah satu daerah dari beberapa kecamatan di kabupaten Banyumas yang memiliki pertambangan. Pertambangan batuan di desa Gunung Wetan masih dibuka dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh bapak Kidam selaku Kepala Desa Gunung Wetan, yaitu bahwa suatu lahan pertambangan di desa diperbolehkan untuk beroperasi asalkan hal tersebut sudah disepakati oleh pihak-pihak lainnya, masyarakat khususnya. Pemerintah selaku badan otonom,

hanya memberikan izin dan perlindungan hukum untuk sebuah operasi pertambangan melalui kebijakan-kebijakannya. Dalam kegiatan produksi pemerintah tidak akan mencampurinya. Hanya saja ada pajak ataupun retribusi yang harus dibayar oleh pengusaha tambang kepada pemerintah daerah. Pertambangan akan berdampak positif bagi mereka yang berpikir kreatif, yang mampu bersaing dalam ekonomi. Mereka yang mampu memanfaatkan hasil bumi sebagai komoditas ekonomi. Dampak negatif dari pertambangan adalah adanya pro dan kontra yang terjadi di dalam masyarakat karena pertambangan.<sup>8</sup>

Kehadiran perusahaan pertambangan di suatu daerah niscaya membawa kemajuan terhadap warga di sekitarnya. Berdiri atau beroperasinya sebuah pertambangan di suatu daerah akan menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan yang terjamin, dan kehidupan sosial yang lebih baik. Pemikiran demikian didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan pertambangan merupakan agen perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Asumsinya, perusahaan pertambangan akan membawa serta arus investasi, membongkar isolasi warga, dan membuka akses masyarakat terhadap dunia luar. Dengan kehadiran perusahaan pertambangan, akan dibangun berbagai infrastruktur yang diperlukan masyarakat seperti jalan, aliran listrik, air bersih, transportasi, dan jaringan komunikasi.<sup>9</sup>

Realitanya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Gunung Wetan masih belum baik. Masih terdapat 33,61% masyarakat desa Gunung Wetan yang masuk dalam angka kemiskinan.<sup>10</sup> Karena asumsi dampak positif dengan adanya perusahaan pertambangan tak akan selalu ada. Berbagai infrastruktur seperti jalan di desa sering mengalami kerusakan akibat menjadi jalur transportasi pertambangan. Masyarakat sekitar tambang juga mengalami

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Kidam, *Kepala Desa Gunung Wetan*, tanggal 25 April 2017 pukul 16.00 WIB.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Aderito Jesus de Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*, (Jakarta: ELSAM, 2003), hlm. 1.

<sup>10</sup> Data Kependudukan Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Tahun 2016.

kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba. Adanya kebijakan pertambangan, juga telah berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Gunung Wetan, yaitu bergesernya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam hal pekerjaan, pendapatan, perubahan pola perilaku masyarakat dan timbulnya konflik. Hal ini digambarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.**  
**Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Wetan**  
**Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas**

<b>Sebelum Adanya Kebijakan Pertambangan</b>	<b>Setelah Adanya Kebijakan Pertambangan</b>
Pekerjaan masyarakat desa Gunung Wetan 80,28% di sektor pertanian, 44,43% sebagai petani dan 35,85% sebagai buruh tani.	Pekerjaan masyarakat desa Gunung Wetan di sektor pertanian khususnya buruh tani yaitu 35,85% mengalami perubahan mata pencaharian sebagai buruh tani menjadi buruh tambang.
Jam kerja di pertanian sangat terasa pengalokasiannya bila telah tiba musim tanam dan panen. Sementara itu pada musim-musim tertentu tenaga kerja pertanian sangat tidak produktif. Hal ini menimbulkan pengangguran musiman.	Dengan adanya kebijakan pertambangan dapat mengurangi pengangguran musiman. Masyarakat buruh tani memanfaatkan peluang kerja di pertambangan untuk mengisi waktu luang di musim tertentu yaitu saat bukan musim tanam dan panen.
Pendapatan di sektor pertanian hanya sesuai dengan musim tanam dan panen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan petani sesuai dengan hasil panen yang didapatkan.</li> <li>2. Pendapatan buruh tani Rp 70.000,00 sampai Rp 100.000,00 per hari.</li> </ol>	Pendapatan di sektor pertambangan dapat diperoleh sesuai dengan waktu beroperasinya pertambangan. Pertambangan beroperasi setiap hari dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Pendapatan pekerja buruh tambang yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan buruh bongkar muat Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 per hari.</li> <li>2. Pendapatan buruh pemecah batu Rp 70.000,00 sampai Rp 210.000,00 per hari.</li> <li>3. Pendapatan operator Rp 10.000 per jam.</li> </ol>
Terjaganya gotong royong dan kerjasama di antara masyarakat, hal ini masih rekatnya hubungan	Terjadinya perubahan pada pola perilaku masyarakat yaitu timbulnya mentalitas masyarakat yang lebih

kekerabatan warga masyarakat yang terlihat pada struktur pekerjaannya di sektor pertanian yang membutuhkan kerjasama satu sama lain.	cenderung individualistis, materialistis, dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat seperti mudarnya gotong royong dan kerjasama di antara masyarakat. Karena pekerjaan di sektor pertambangan berorientasi pada upah yang didapatkan sendiri tidak ada konsep kerjasama di dalamnya. Hal ini juga berdampak pada hubungan kekerabatan warga masyarakat mulai merenggang yang dapat menimbulkan konflik.
--	---

Sumber: Olahan Data Primer

Sedangkan bagi pemerintah daerah, pertambangan mampu meningkatkan jumlah APBD yang akan diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dari pembayaran kewajiban dari perusahaan tambang kepada pemerintah daerah. Jenis-jenis kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan tambang kepada pemerintah daerah, meliputi *land rent* (sewa tanah), royalti, pajak bumi dan bangunan (PBB), deviden, pajak air tanah, dan lain-lain.<sup>11</sup> Pajak yang diterima oleh pemerintah daerah cukup untuk membiayai pembangunan daerah, yang dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realisasi pemasukan APBD di Kabupaten Banyumas pada sektor pajak pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terlihat dari data laporan keuangan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas yang rinciannya digambarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.**  
**Realisasi Pemasukan APBD Kabupaten Banyumas**  
**Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Tahun	Realisasi Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
2012	Rp 172.572.008,00

<sup>11</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 73.



2013	Rp 1.539.360.181,00
2014	Rp 2.186.339.453,00
2015	Rp 1.620.026.569,00
2016	Rp 3.556.248.433,00.
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 9.074.546.644,00</b>

Sumber: Olahan Data Sekunder Laporan Keuangan Tahunan BKD Kab. Banyumas

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mengenai kebijakan pertambangan batuan penting untuk dilakukan di desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang, mengingat dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatifnya. Karena dalam proses penggalian tersebut perlu memperhatikan interaksi antar faktor sosial dan ekonomi sehingga dampak yang terjadi dapat diketahui. Maka hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATUAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA GUNUNG WETAN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS”.**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemahaman judul diatas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

### **1. Dampak Kebijakan Pertambangan Batuan**

Secara etimologis, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif maupun positif.<sup>12</sup> Kebijakan adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.<sup>13</sup> Pertambangan berasal dari kata tambang yang merupakan tempat menggali atau mengambil hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara dan sebagainya.<sup>14</sup> Dampak

<sup>12</sup> Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 137.

<sup>13</sup> Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer...*, hlm . 92.

<sup>14</sup> Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer...*, hlm. 638.

kebijakan pertambangan adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari ketetapan pemerintah yang dilakukan secara sadar dan terencana, untuk mengelolah mineral batubara dan hasil bumi lainnya yang ada diperut bumi.<sup>15</sup> Batuan adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi yang bukan logam.<sup>16</sup>

Jadi, dampak kebijakan pertambangan batuan adalah suatu pengaruh yang terjadi baik positif maupun negatif sebagai akibat dari ketetapan pemerintah yang dilakukan dalam pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pengambilan hasil bumi berupa batuan agar dapat mencapai sasaran.

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara bahasa, kondisi adalah suatu keadaan. Sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “*Oiku*” dan “*Nomos*” yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga.<sup>17</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan seseorang yang berkenaan dengan masyarakat dan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga.

IAIN PURWOKERTO

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan

---

<sup>15</sup> Samuel Risal dan DB. Paranoan, “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman”, *eJournal Administrative Reform*, ISSN 0000-0000, 2013, 1 (1): 117-131

<sup>16</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 53.

<sup>17</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 1.

pertambangan batuan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pertambangan batuan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan.

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan teori-teori ilmu sosial, ekonomi, dan politik secara umum.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini sebagai bentuk penerapan atau aplikasi dari ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan.

###### **b. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya memanfaatkan sumber daya mineral untuk kesejahteraan umum sampai waktu yang akan datang.

###### **c. Bagi Masyarakat**

Diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kebijakan pertambangan dengan bijak agar sumber daya mineral dapat terjaga hingga masa yang akan datang.

#### **E. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk

mengetahui apa yang telah ada dan yang belum ada.<sup>18</sup> Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, penulis menemukan ada sejumlah karya yang meneliti tentang dampak kebijakan pertambangan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, diantaranya antara lain:

Jurnal oleh Samuel Risal, DB. Paranoan, dan Suarta Djaja yang berjudul “*Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman*”.<sup>19</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang dampak kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi yang terjadi di kelurahan Makroman.

Jurnal oleh Rival Amrinald, Slamet Rianto, M.Pd., dan Yuherma, S.P, M.Pd. yang berjudul “*Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Bagi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Aliran Batang Bayang Kecamatan Bayang*”.<sup>20</sup> Jurnal ini membahas tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan Aliran Batang Bayang Kecamatan Bayang akibat adanya penambangan bahan galian golongan C.

Skripsi oleh Fachri Fadhil yang berjudul “*Pengaruh Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan*”.<sup>21</sup> Skripsi ini membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan.

Skripsi oleh Oktavina Gustan yang berjudul “*Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di RT 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara*”.<sup>22</sup> Skripsi

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 75.

<sup>19</sup> Samuel Risal dan DB. Paranoan, “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman”, *eJournal Administrative Reform*, ISSN 0000-0000, 2013, 1 (1): 117-131.

<sup>20</sup> Rival Amrinald, Slamet Rianto dan Yuherma, “Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Bagi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Aliran Batang Bayang Kecamatan Bayang”, *Jurnal STKIP PGRI Sumatera Barat*.

<sup>21</sup> Fachri Fadhil, skripsi “Pengaruh Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan”, ( Kendari: Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Halu Oleo, 2017), hlm. 1.

<sup>22</sup> Oktaviana Gustan, skripsi “Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di RT 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai

ini membahas dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara terhadap masyarakat di RT 17, desa Loa Duri Ulu, kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara pada dampak sosial dan dampak ekonomi yang terjadi.

Jurnal oleh Ilmi Hakim yang berjudul “*Dampak Kebijakan Pertambangan Batubara Bagi Masyarakat Bengkuriang Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara*”.<sup>23</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang dampak kebijakan pertambangan batubara yang menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara.

**Tabel 4.**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>JUDUL JURNAL/SKRIPSI</b>	<b>PENULIS</b>	<b>HASIL/ TEMUAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
<i>Jurnal: Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman</i>	Semuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja	keberadaan perusahaan pertambangan berdampak positif bagi sebagian kecil masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dan kontrakan rumah, peluang kerja di sektor pertambangan sangat kecil, telah membawa kerusakan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam skala yang besar, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sangat rendah, Hadirnya industri pertambangan tidak membawa perubahan bagi keadaan ekonomi masyarakat, dan kebijakan pertambangan lebih	Pada jurnal ini membahas dampak kebijakan pertambangan batubara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sedangkan penulis akan membahas dampak kebijakan pertambangan batuan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kartanegara”, (Samarinda: Jurusan Manajemen Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, 2012), hlm. 1.

<sup>23</sup> Ilmi Hakim, “Dampak Kebijakan Pertambangan Batubara Bagi Masyarakat Bengkuriang Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara”, *eJournal IP FISIP-UNMUL*, 2015.

		berpihak pada kepentingan para pemilik modal dan mengabaikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ada di atasnya.	
<i>Jurnal: Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Bagi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Aliran Batang Bayang Kecamatan Bayang</i>	Rival Amrinald, Slamet Rianto, M.Pd., Yuherma, S.P, M.Pd.	Pendidikan masyarakat masih rendah, sehingga maraknya masyarakat melakukan pertambangan bahan galian golongan C (batu) tanpa berfikir lebih dewasa akan resiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, pada umumnya masyarakat mempunyai mata pencarian sebagai bertani dan memotong getah namun hasil dari mata pencarian tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehingga banyak masyarakat melakukan mata pencarian sampingan yaitu penambangan bahan galian golongan C (batu) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada umumnya masyarakat yang berada di kawasan aliran Batang Bayang Kecamatan Bayang mempunyai pendapatan tidak menentu tergantung pada keadaan cuaca, pendapatan masyarakat pun bervariasi sekitar 135-200 ribu/hari dari pekerjaan utama, sedangkan 50-100 ribu/ hari dari pekerjaan sampingan, penambangan bahan galian C (batu) tersebut. Sehingga maraknya pertambangan bahan galian golongan C (batu) yang dilakukan masyarakat untuk	Pada jurnal ini langsung membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan pertambangan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, sedangkan penulis akan memulai pembahasan dari kebijakan pertambangan terlebih dahulu yang menyebabkan di bukanya pertambangan yang dapat memberikan dampak sosial ekonomi pada masyarakat.

		meningkatkan dan menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	
<i>Skripsi: Pengaruh Pertambahan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.</i>	Fachri Fadhil	Terjadinya perubahan mata pencaharian dan adanya peningkatan pendapatan dimana sebelum ada kegiatan penambangan, pendapatan rata-rata responden yaitu Rp 583, 913. Tetapi, setelah ada penambangan maka pendapatan rata-rata responden menjadi Rp 1.277,681/bulan. Aset pribadi respondenpun ikut bertambah, hal ini disebabkan karena peluang pendapatan yang mereka dapatkan lebih besar. Dengan adanya pertambangan nikel juga ikut memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Tinanggea serta memberikan peluang usaha. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi menjadi lebih baik.	Pada skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan populasi masyarakatnya, sedangkan penulis akan meneliti dampak kebijakan pertambangan batuan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Gunung Wetan khususnya kepada pekerja tambang yang semula merupakan buruh tani.
<i>Skripsi: Dampak Pertambahan Batubara Terhadap Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di RT 17, Desa</i>	Oktavina Gustan	Dampak sosial yang terjadi yaitu pihak perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya di RT 17 berupa bantuan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, rumah ibadah, pembangunan balai desa, dan pembangunan jalan desa. Sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan adalah terbukanya	Pada Skripsi ini membahas tentang dampak pertambangan batubara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar pertambangan yaitu di RT 17, sedangkan penulis akan meneliti dampak kebijakan pertambangan terhadap kondisi sosial ekonomi



<p><i>Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara</i></p>		<p>peluang usaha bagi warga sekitar khususnya warga RT 17, dimana sebagian besar warga RT 17 bekerja sebagai karyawan PT. BBE.</p>	<p>masyarakat desa Gunung Wetan Khususnya para pekerja tambang yang awalnya sebagai buruh tani.</p>
<p><i>Jurnal: Dampak Kebijakan Pertambangan Batubara Bagi Masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda utara</i></p>	<p>Ilmi Hakim</p>	<p>Hasil penelitiannya terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah terbukanya daerah terisolasi, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat walaupun tidak seberapa, namun pembebasan lahan masyarakat yang termasuk dalam kuasa pertambangan menyebabkan masyarakat lokal memiliki modal peluang usaha baru, menampung tenaga kerja, khususnya masyarakat sekitar perusahaan pertambangan batu bara. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurang memperhatikan kelestarian lingkungan, kerusakan lingkungan apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat akan menjadi lahan kritis sampai akhirnya menjadi gersang, berkurangnya luas hutan, dan salah satu dampak yang sangat jelas terlihat adalah lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara dalam mengatasi dampak</p>	<p>Pada jurnal ini membahas tentang dampak kebijakan pertambangan batubara terhadap kondisi masyarakat secara umum, sedangkan penulis ingin meneliti dampak kebijakan pertambangan batuan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.</p>

		pertambangan batubara bagi masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara adalah dengan melakukan reklamasi, dan membuat jalur khusus untuk kendaraan tambang.	
--	--	---	--

*Sumber: Berbagai Jurnal*



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Dampak Kebijakan Pertambangan

##### 1. Dampak kebijakan

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat positif berupa manfaat, dapat pula bersifat negatif berupa resiko, kepada lingkungan fisik dan non fisik termasuk sosial ekonomi.<sup>1</sup> Menurut Salim, dampak adalah suatu perubahan atau efek yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang tidak direncanakan atau diluar sasaran. Dampak dapat bersifat biofisik dan atau dapat juga bersifat sosial-ekonomi dan budaya. Dampak dapat bersifat negatif maupun positif. Untuk mengetahui bahwa suatu dampak atau perubahan telah terjadi, kita harus mempunyai bahan perbandingan sebagai acuan. Salah satunya adalah keadaan sebelum terjadi perubahan.<sup>2</sup>

Amri Marzali menyatakan di dalam bukunya, *Antropologi dan Kebijakan Publik* bahwa kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi *rewards* dan *sanctions*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Otto Sumarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 43.

<sup>2</sup> Ilmi Hakim, "Dampak Kebijakan Pertambangan Batubara Bagi Masyarakat Bengkuluang Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara", *eJournal IP FISIP-UNMUL*, 2015.

<sup>3</sup> Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 19.

Kata kebijakan diterjemahkan dari kata *policy*. Kata *policy* berasal dari bahasa Yunani dan Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam Bahasa Yunani dan Sansekerta; *polis* (negara kota) dan *pur* (kota), dikembangkan ke dalam bahasa Latin menjadi *politea* (negara), dan akhirnya dalam bahasa Inggris pada abad pertengahan, dikenal dengan *policy*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. *Policy* dan *politea* pada hakikatnya berarti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengupayakan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan warga kota atau masyarakat (*bonum commune*).<sup>4</sup> Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, *proposal*, *grand design*.<sup>5</sup>

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup> James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action folowed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.83.

<sup>5</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Jakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 16.

<sup>6</sup> Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (PERS), 2014), hlm. 2.

<sup>7</sup> Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik...*, hlm. 4.

Menurut Dye, dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata.<sup>8</sup> Budi Winarno menyatakan tentang dampak kebijakan mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.<sup>9</sup> Studi tentang dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn mengkaji konsekuensi-konsekuensi dari suatu keputusan kebijakan.<sup>10</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian oleh para ahli, bahwa Dampak kebijakan adalah suatu perubahan yang ditimbulkan oleh suatu keputusan yang direncanakan dan diambil oleh pemerintah untuk mengatur penduduk guna mengupayakan kebaikan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat yang memiliki tujuan tertentu agar tercapainya sebuah kegiatan yang telah direncanakan.

## 2. Kebijakan Pertambangan

Kebijakan Pertambangan adalah ketetapan pemerintah yang dilakukan secara sadar dan terencana, untuk mengelola mineral batubara dan hasil bumi lainnya yang ada diperut bumi.<sup>11</sup> Pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan perusahaan.<sup>12</sup> Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

---

<sup>8</sup> Samuel Risal dan DB. Paranoan, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman", *eJournal Administrative Reform*, ISSN 0000-0000, 2013, 1 (1): 117-131.

<sup>9</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Jakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 145.

<sup>10</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses...*, hlm. 147.

<sup>11</sup> Samuel Risal dan DB. Paranoan, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman", *eJournal Administrative Reform*, ISSN 0000-0000, 2013, 1 (1): 117-131.

<sup>12</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>13</sup>

Beberapa tahapan kegiatan dalam pertambangan diantaranya memiliki tujuan tertentu, yaitu:

- a. Penyelidikan umum yaitu untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- b. Eksplorasi adalah untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- c. Studi kelayakan adalah untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- d. Konstruksi adalah untuk melakukan pembangunan seluruh operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- e. Penambangan bertujuan untuk memproduksi mineral, batubara dan mineral ikutannya.
- f. Pengolahan dan pemurnian adalah untuk meningkatkan mutu mineral, batubara, dan untuk memanfaatkan serta memperoleh mineral ikutan.
- g. Pengangkutan adalah untuk memindahkan mineral, batubara dari daerah tambang, tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- h. Penjualan adalah untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- i. Pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan

---

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat 13.

untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.<sup>14</sup>

Jenis-jenis usaha pertambangan yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas menyebutkan jenis usaha pertambangan yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas:

- a. pertambangan mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
- b. pertambangan mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, yterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. pertambangan mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. pertambangan batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit,

---

<sup>14</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 158-163.

tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.<sup>15</sup>

### 3. Dampak Kebijakan Pertambangan

Samuel Risal dan DB. Paranoan yaitu bahwa dampak kebijakan pertambangan adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari ketetapan pemerintah yang dilakukan secara sadar dan terencana, untuk mengelola mineral batubara dan hasil bumi lainnya yang ada diperut bumi.<sup>16</sup>

Secara sosial ekonomi, pertambangan memberikan dampak terhadap masyarakat. Menurut Irwandy Arif, kegiatan pertambangan memberikan manfaat ekonomi diantaranya yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung merupakan faedah atau kegunaan yang terus dirasakan, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat akibat adanya kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Manfaat langsung itu meliputi:

- a. Penerimaan pajak dan royalti
- b. Penciptaan lapangan kerja
- c. Bahan tambang untuk industri.

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 8 Ayat 3.

<sup>16</sup> Samuel Risal dan DB. Paranoan, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman", *eJournal Administrative Reform*, ISSN 0000-0000, 2013, 1 (1): 117-131.



Sedangkan manfaat tidak langsung merupakan manfaat tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat, namun masyarakat dapat menikmati dan merasakan akibat adanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Manfaat tidak langsung meliputi:

- a. sirkulasi barang dan jasa yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat lokal, regional, dan nasional.
- b. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, sarana ibadah dan lainnya.
- c. Munculnya usaha pendukung untuk memasok kebutuhan pangan, sandang, dan pangan karyawan.
- d. Melahirkan industri-industri pengolahan tambang yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, produk-produk turunan, dan sebagainya.

Salim HS mengemukakan bahwa pertambangan memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif dari kegiatan pertambangan meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatnya ekonomi masyarakat.
- d. Menampung tenaga kerja lokal.
- e. Meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur.

Sedangkan dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang, meliputi:

- a. Timbulnya konflik atau sengketa antara masyarakat dengan perusahaan tambang dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat akibat adanya divestasi saham dari pemodal asing.
- b. Menurunnya moral masyarakat.
- c. Melonjaknya harga bahan kebutuhan sehari-hari, seperti harga ikan dan daging yang cukup mahal.

d. Kerusakan lingkungan fisik dan lain-lain.<sup>17</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan pertambangan adalah perubahan yang terjadi sebelum dan sesudahnya kepada kehidupan masyarakat dalam aspek sosial ekonomi sebagai akibat dari ketetapan pemerintah yang dilakukan secara sadar dan terencana, untuk mengelola mineral batubara dan hasil bumi lainnya yang ada diperut bumi.

## **B. Kondisi Sosial Ekonomi**

### **1. Konsep Kondisi Sosial Ekonomi**

Kondisi sosial ekonomi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan (kekuasaan) seseorang dan peranan yang dimiliki orang yang bersangkutan di dalam masyarakat di mana ia menjadi anggota atau partisipan. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi sama halnya dengan status seseorang. Status cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan status orang lain berdasarkan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang dipakai didasarkan pada salah satu atau kombinasi yang mencakup tingkat pendapatan, pendidikan, prestise atau kekuasaan.<sup>18</sup>

Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Jadi kedudukan sebenarnya merupakan kumpulan dari hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang dalam pola kehidupan tertentu. Hubungan kedudukan ini sama halnya dengan status.<sup>19</sup> Untuk mengukur status seseorang menurut Pitirim Sorokin secara rinci dapat dilihat dari:

---

<sup>17</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 158-163.

<sup>18</sup> Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan suatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 139.

<sup>19</sup> Yayuk Yuliati dan Mangku Poernomo, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 191.

- a. Jabatan atau pekerjaan
- b. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan
- c. Kekayaan
- d. Politis
- e. Keturunan
- f. Agama<sup>20</sup>

Status sosial yaitu kedudukan individu dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. Status sosial seseorang merupakan aspek statis yang berupa derajat atau tingkat kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan mempunyai ciri serta perbedaan yang jelas dengan status-status sosial yang lain. Umpamanya status pegawai negeri berbeda dengan status para buruh, pedagang, guru dan lain-lain.<sup>21</sup>

Manaso Malo juga memberikan batasan tentang kondisi sosial ekonomi yaitu suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam sosial masyarakat. Pemberian posisi disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai adanya saling kenal mengenal antar satu dengan yang lain, paguyuban, sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan. Sementara W.S Winke menyatakan bahwa pengertian status sosial ekonomi mempunyai makna suatu keadaan yang menunjukkan pada kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki, dimana keadaan ini bertaraf baik, cukup, dan kurang.<sup>22</sup>

Soejono Soekanto mengemukakan bahwa kedudukan sosial ekonomi di dalam keluarga dapat dilihat dari tingkat pendidikan keluarga dan pemilihan tempat rekreasi. Mereka yang kurang mampu

---

<sup>20</sup> J. Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 136-137.

<sup>21</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 93.

<sup>22</sup> Basrowi dan Siti Juariyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010*.

mungkin hanya menyekolahkan anaknya sampai Sekolah Menengah Atas saja, ada juga yang hanya sampai Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang kemudian dianjurkan untuk bekerja saja. Mereka dari kedudukan sosial ekonomi yang relatif rendah tidak memiliki peluang yang terlalu banyak untuk memilih rekreasi yang tersedia. Mereka lebih memilih membantu orang tuanya untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini berbanding terbalik dengan keluarga dengan status sosial ekonomi menengah, mereka mendapatkan peluang yang lebih banyak untuk memilih rekreasi. Sedangkan mereka yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi, bagi mereka terbentang lingkup pilihan yang sangat luas.<sup>23</sup> Di lain pihak, Soentoro mengemukakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin terbuka kesempatan mereka untuk memilih pekerjaan dari berbagai alternatif pekerjaan.<sup>24</sup>

Tumin mengemukakan bahwa tingkat sosial ekonomi yang sama belum tentu menghasilkan gaya hidup yang sama. Begitu pula gaya hidup yang sama belum tentu mencerminkan gambaran sosial ekonomi yang sama pula. Sebagai konsekuensi dari kenyataan tersebut, maka ia mengacu terhadap studi gaya hidup dari dua pendekatan yang berbeda yaitu dengan mempertanyakan gaya hidup dari mereka yang memiliki sosial ekonomi yang sama dan dengan melihat ciri-ciri sosial ekonomi yang bagaimana dari mereka yang memiliki gaya hidup yang sama yaitu menjadi indikator untuk menentukan di mana tingkat seseorang berada, misalnya dari tempat tinggalnya dan tipe rumah yang ditempatinya dan sebagai penghargaan atas konsekuensi dari adanya ketidaksamaan dengan yang lain. Di mana untuk mencapai rumah atau tempat tinggal tertentu dibedakan oleh pendapatan, pendidikan dan pekerjaannya serta sebagai teknik untuk menetapkan keabsahan tingkat kehormatan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwah Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 63.

<sup>24</sup> Yayuk Yulianti dan Mangku Poernomo, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 58.

seseorang mencari bentuk atau cara untuk pengabsahan bahwa dia telah berada pada level atau status yang baru.<sup>25</sup>

Selanjutnya Mubyarto berpendapat tinjauan sosial ekonomi penduduk meliputi aspek sosial, aspek sosial budaya, dan aspek desa yang berkaitan dengan kelembagaan dan aspek peluang kerja. Aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat Desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga mereka cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya. Menurut pendapat Sajogyo dalam hubungan dengan pola berusaha tani, perbedaan status seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh pola penguasaan lahan, modal, teknologi, dan luasnya lahan pemilikannya.<sup>26</sup>

Menurut Siagian, apabila keadaan sosial ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan masih ditandai oleh pertambahan penduduk yang cukup pesat dan sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian dan sektor-sektor tradisional, maka hal seperti ini dikatakan dalam keadaan sosial ekonomi masyarakat miskin. Dalam situasi seperti ini tekanan terhadap sumberdaya lahan semakin besar dan rata-rata penguasaan aset lahan setiap rumah tangga semakin minim bahkan banyak rumah tangga yang tidak memiliki lahan garapan.<sup>27</sup>

Darmansyah menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi yang ditandai dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk dan belum meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh pelosok tanah air yang mengakibatkan makin bertambahnya pengangguran di kalangan pemuda. Kurangnya lapangan kerja, menimbulkan berbagai problema

---

<sup>25</sup> Elly M. Setiadi, Kama Abdul Hakam dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 108.

<sup>26</sup> Basrowi dan Siti Juariyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010*.

<sup>27</sup> Yayuk Yulianti dan Mangku Poernomo, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 71.

sosial dan frustrasi di kalangan pemuda. Sebagai akibat dari tingginya kebutuhan akan pendidikan yang tidak seimbang dengan penyediaan sarana-sarana atau fasilitas pendidikan, menyebabkan banyaknya pemuda putus sekolah dan tidak tertampung pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pula akibat dari anggaran Pemerintah yang terbatas, mengakibatkan pula terbatasnya kemampuan dalam penyediaan sarana-sarana dan peningkatan fasilitas bagi latihan-latihan keterampilan. Hal ini merupakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bermasalah.

Pola relasi sosial ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pola relasi antara manusia (subjek) dengan sumber-sumber kemakmuran ekonomi seperti alat-alat produksi, fasilitas-fasilitas negara, perbankan dan kekayaan sosial. Apakah ini dimiliki, disewa, bagi-hasil, gampang atau sulit atau oleh subjek tersebut.
- b. Pola relasi antara subjek dengan hasil produksi. Ini menyangkut masalah distribusi hasil, apakah memperoleh apa yang diperlukan sesuai dengan kelayakan derajat hidup manusiawi.
- c. Pola relasi antara subjek atau komponen-komponen sosial-ekonomi dalam keseluruhan mata rantai kegiatan dengan bangunan sistem produksi. Dalam hal ini adalah mekanisme pasar, bagaimana posisi dan peranan manusia sebagai subjek dalam berfungsinya mekanisme tersebut.<sup>28</sup>

Dari pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, posisi atau kedudukan seseorang yang berkaitan dengan status dan peranan yang dimiliki, dilengkapi dengan hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi di dalam masyarakat, dapat dilihat melalui pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, aspek finansial atau kekayaan, laju

---

<sup>28</sup> M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Eresco, 1993), hlm. 176.

pertumbuhan penduduk, politis, keturunan, agama, pemilihan tempat rekreasi dan gaya hidup. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat ditandai dengan saling kenal, paguyuban, sifat gotong royong dan kekeluargaan.

## 2. Aspek Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Menurut Talcott Parsons, berpendapat bahwa beberapa indikator tentang penilaian seseorang mengenai kedudukan seseorang dalam lapisan sosial masyarakat antara lain:

- a. Bentuk ukuran rumah, keadaan perawatan, tata kebun, dan sebagainya.
- b. Wilayah tempat tinggal, apakah bertempat di kawasan elite atau kumuh.
- c. Pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh seseorang.
- d. Sumber pendapatan.

Abdulsyani menyatakan bahwa total penghasilan, pengeluaran, simpanan dan kepemilikan harta yang bernilai ekonomis merupakan indikator untuk menentukan tingkat kondisi ekonomi seseorang.<sup>29</sup> Aspek atau indikator kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu dilihat dari pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status kepemilikan, jenis tempat tinggal, status kepemilikan, jenis tempat tinggal, status dalam masyarakat, dan partisipasi dalam masyarakat

- a. Pendidikan.
- b. Pekerjaan.
- c. Pendapatan.
- d. Status kepemilikan.
- e. Jenis tempat tinggal.
- f. Status dalam masyarakat.
- g. Partisipasi dalam masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Jesi Ratnasari, dkk., "Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi di SMA", *e-Journal Pendidikan Ekonomi FKIP Untan*.

<sup>30</sup> Jesi Ratnasari, dkk., *e-Journal Pendidikan Ekonomi FKIP Untan*.



Menurut Melly G. Tan, untuk melihat kedudukan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat, yaitu dari pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan hal ini, masyarakat tersebut digolongkan ke dalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi.<sup>31</sup>

### 3. Lapisan Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi menempatkan seseorang dalam lapisan sosial ekonomi tertentu yang masuk dalam pembahasan stratifikasi sosial. Dalam kaitannya dengan stratifikasi sosial Max Weber menjelaskan stratifikasi sosial dalam tiga dimensi, yaitu dimensi kekayaan, dimensi kekuasaan, dan dimensi prestise. Dimensi tersebut membentuk formasi sosial tersendiri. Dimensi kekayaan membentuk formasi sosial yang disebut kelas, dimensi kekuasaan membentuk partai, dan dimensi prestise membentuk status.<sup>32</sup>

Sorokin mengemukakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (*hierarkis*). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya disebutkan bahwa dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab dan nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.

Inti dari stratifikasi sosial adalah perbedaan akses golongan satu dengan golongan masyarakat yang lain dalam memanfaatkan sumber daya. Jadi, dalam stratifikasi sosial, tingkat kekuasaan, hak istimewa dan prestise individu tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik personalnya. Ada tiga aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial, yaitu:

- a. Perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Anggota masyarakat yang menduduki strata tinggi, tentu memiliki

<sup>31</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 35.

<sup>32</sup> Elly M. Setiadi, dkk., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 104-105.



kesanggupan dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan anggota masyarakat yang di bawahnya.

- b. Perbedaan dalam gaya hidup (*life style*).
- c. Perbedaan dalam hak-hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya.

Menurut Zanden, dalam memahami stratifikasi sosial dapat menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain yaitu:

- a. Pendekatan Objektif

Artinya, usaha untuk memilah-milah masyarakat ke dalam beberapa lapisan dilakukan menurut ukuran-ukuran yang objektif berupa variabel yang mudah diukur secara kuantitatif, seperti membagi masyarakat menurut kategori umur, tingkat pendidikan, atau perbedaan besar penghasilan.

- b. Pendekatan Subjektif

Artinya, munculnya pelapisan sosial dalam masyarakat tidak diukur dengan kriteria-kriteria yang objektif, melainkan dipilih menurut kesadaran subjektif warga masyarakat itu sendiri. Pendekatan subjektif yang tersusun adalah kategori sosial yang ditandai oleh kesadaran jenis. Misalnya dalam pendekatan objektif seseorang dinilai miskin karena faktor yang dapat dinilai dengan statistik, tapi di dalam pendekatan subjektif seseorang tersebut dapat dikatakan tidak miskin.

- c. Pendekatan Reputasional

Artinya, pelapisan sosial disusun dengan cara subjek penelitian diminta menilai status orang lain dengan jalan menempatkan orang lain tersebut ke dalam suatu skala tertentu. Untuk mencari di desa yang termasuk kelas atas, peneliti melakukannya dengan cara menanyakan kepada warga desa tersebut

siapakah warga desa setempat yang paling kaya atau yang paling mungkin diminta pertolongan meminjamkan yang dan sebagainya.<sup>33</sup>

Dalam kedudukan atau status pada lapisan sosial ekonomi, menurut Parsons bahwa individu dalam masyarakat menyanggah dua status yang dinamakan *ascribed status* dan *achieved status*. *Ascribed status* merupakan status yang disandang individu secara otomatis, status ini diperoleh dari keturunan atau silsilah keluarga, ras, juga secara biologis. Seorang individu akan mempelajari *ascribed status* ini dalam lingkungan keluarganya. Contoh status ini adalah anak seorang raja secara otomatis menyanggah gelar sebagai seorang pangeran.

Pada masyarakat Jawa, status sosial seorang anak akan ditentukan oleh keluarganya, misalnya priyayi, bangsawan dan sebagainya. Sejak lahir seseorang individu juga sudah menyanggah status sesuai sukunya, yaitu suku Jawa, Batak, Dayak dan sebagainya. Ia juga menyanggah status secara biologis yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan *achieved status* merupakan status yang diperoleh individu melalui kerja keras atau perjuangan. Status ini akan diperoleh individu sesuai prestasinya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam lingkungan masyarakat, individu tidak lagi menyanggah peran dari *achieved status*-nya. Contoh status ini adalah sarjana, guru, pedagang, kepala desa, presiden, dan sebagainya.<sup>34</sup>

#### 4. Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi

Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat disebut juga dengan transformasi sosial ekonomi. Yunus menyatakan bahwa transformasi ekonomi dilihat dari perspektif kegiatan penduduk asli dan perspektif penduduk pendatang. Sedangkan transformasi sosial dapat dilihat dari perspektif mata pencaharian, keterampilan, kekerabatan,

---

<sup>33</sup> J. Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 132-147.

<sup>34</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 271.

kelembagaan, strata sosial, kontrol sosial, dan mobilitas penduduk.<sup>35</sup> Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari sebelum dan sesudahnya. Perubahan dari aspek ekonomi dapat dilihat dari variabel taraf hidup masyarakat. Sedangkan dari aspek sosial, dilihat dari variabel tingkat kerjasama antar masyarakat.<sup>36</sup>

Perubahan kondisi sosial ekonomi terjadi karena adanya dampak sosial ekonomi itu sendiri. Dampak sosial ekonomi menurut Homenuck dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok *real impact* dan *special impact*. *Real impact* adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari aktivitas proyek, pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi misalnya migrasi penduduk, kebisingan atau polusi udara. *Special impact* adalah suatu dampak yang timbul dari persepsi masyarakat terhadap resiko dari adanya proyek. Dampak sosial ekonomi dapat dikaji melalui peluang berusaha, peningkatan pendapatan, perubahan mata pencaharian, perubahan perilaku masyarakat dan konflik.<sup>37</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah perubahan pada masyarakat yang dapat di lihat sebelum dan sesudahnya. Perubahan kondisi sosial ekonomi dapat dilihat dari perubahan mata pencaharian, ketrampilan, kekerabatan, kelembagaan, strata sosial, kontrol sosial, mobilitas penduduk, perubahan taraf hidup masyarakat, tingkat kerjasama antar masyarakat, peluang berusaha, peningkatan pendapatan, perubahan perilaku masyarakat dan konflik. Aspek tersebut dipilih menjadi tolak ukur indikator kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan

---

<sup>35</sup> Nurma Kumala Dewi dan Iwan Rudiarto, "Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang", *Jurnal Wilayah dan Lingkungan Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, 175-188*.

<sup>36</sup> Emma Hijriati dan Rina Mardiana, "Pengaruh ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhan Sukabumi", *Jurnal Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB ISSN : 2302-7517, VOL.02, No.03*.

<sup>37</sup> Dedek Apriyanto dan Rika Harini, "Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosialekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggara, Kutai Kartanegara", *e-Journal*.

dengan asumsi bahwa aspek tersebut sangat mudah dilihat dan diukur secara deskriptif oleh peneliti. Bukan hanya itu, aspek tersebut juga sudah tidak menjadi hal yang asing lagi dalam menentukan tingkat sosial ekonomi seseorang di dalam masyarakat. Karena kebanyakan dari mereka melihat seseorang lainnya untuk mengukur tingkat sosial ekonomi melihat dari aspek tersebut. Hal inilah yang dapat menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan memiliki kondisi sosial ekonomi rendah, sedang maupun tinggi.

### C. Landasan Teologis

#### 1. Kebijakan Pertambangan

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah* di bumi. Kewajiban manusia di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptanya. Perintah Allah untuk mengambil dan memelihara segala sesuatu yang ada di bumi kepada manusia.<sup>38</sup>

Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya *khalifah* Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (*nahi munkar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruf*). Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas tentang pertambangan untuk dapat diambil manfaatnya guna memenuhi kebutuhan hajat hidup bersama. Barang tambang diberikan

---

<sup>38</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 542.

oleh Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini:

a. Al-Hadid ayat 4

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ  
الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ  
وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

...“Ia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya...”

Salah satu pengertian dari ayat ini adalah menggambarkan adanya tambang minyak dan gas bumi lainnya yang perlu dieksploitasi dengan bijaksana dan diolah atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan utama manusia dalam bentuk materi adalah pangan, sandang dan papan. Ketiga kebutuhan materi yang utama ini bahan bakunya berasal dari sektor primer (pertanian dan pertambangan). Untuk bisa dikonsumsi, dipakai dan dinikmati perlu diolah lagi oleh sektor industri, sehingga Allah SWT memberikan anjuran dan pedoman serta pengetahuan kepada manusia bagaimana mengolah atau memprosesnya, yang berarti Allah SWT telah memberikan atau menyempurnakan nikmat-Nya kepada manusia.<sup>39</sup>

b. Ar-Rum ayat 41

---

<sup>39</sup> Ahmad Gazali, *Menuju Masyarakat Industri Yang Islami*, (Jakarta: PT: Nimas Multima, 1996), hlm. 100-101.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

... “Telah timbul kerusakan di darat dan di laut oleh karena perbuatan yang diproduksi manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar...”

Seorang pengusaha industri haruslah secara sadar dan berencana menggunakan dan mengolah sumber daya secara bijaksana dan efisien, agar pembangunan industri tersebut dapat berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan pengusaha dan para karyawannya, masyarakat sekitarnya dan keseimbangan serta kelestarian sumber daya. Usaha tersebut harus mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup dan mengharuskan kepada seluruh aparatnya untuk senantiasa berbuat kepada yang paling baik agar tidak terjadi kerusakan dan pencemaran.

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya dampak negatif berupa kerusakan dan pencemaran (fisik dan non fisik), maka manusia dalam berfikir dan berbuat haruslah berpegang kepada prinsip “*ihsan*”, yaitu selalu berorientasi kepada yang paling baik atau benar, karena semua amal (perbuatan) ditujukan kepada pengabdian untuk Allah, yang meskipun kita tidak melihat-Nya tetapi Allah selalu melihat kita. Allah menyenangi dan memberkati orang-orang yang berbuat kebaikan (*ihsan*) dan tidak menyukai atau akan mengazab orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>40</sup>

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi

---

<sup>40</sup> Ahmad Gazali, *Menuju Masyarakat Industri Yang Islami*, (Jakarta: PT: Nimas Multima, 1996), hlm. 41-42.

Al-Qur'an dalam hal ini tidak menjadikan dirinya sebagai pengganti usaha manusiawi, melainkan sebagai pendorong dan pemandu, demi berperannya manusia secara positif dalam bidang-bidang kehidupan. Dari ayat-ayat Al-Qur'an, dapat dipahami bahwa perubahan hanya dapat terlaksana bila memenuhi dua syarat pokok, yaitu adanya nilai atau ide dan adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Ayat yang menjelaskan tentang perubahan sosial ekonomi pada manusia adalah:

a. Al-Ra'd ayat 11

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا  
 فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

... “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia...”

Menurut Quraish Shihab, surat tersebut berbicara tentang hukum perubahan kondisi pada manusia. Di samping berbicara tentang manusia sebagai totalitas, juga menekankan bahwa manusia yang dimaksud bukan dalam kedudukannya sebagai wujud perseorangan, tetapi dalam kedudukannya sebagai wujud perseorangan, dalam kedudukannya sebagai salah seorang anggota masyarakat. Pengganti nama pada kata *anfusihihim* (diri-diri mereka) tertuju kepada *qaum* (masyarakat) yang disebutkan sebelumnya. Ini berarti bahwa perubahan yang hanya terjadi pada satu sampai dua



orang, yang tidak mampu mengalirkan arus kepada masyarakat, tidak mungkin menghasilkan perubahan masyarakat.<sup>41</sup>

b. Al- Jatsiyah ayat 28

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

... “Dan (pada hari kemudian) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk (mempertanggungjawabkan isi) buku catatan amalannya. Pada hari itu kamu (hai umat) diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan...”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada diri seseorang harus diwujudkan dalam landasan yang kokoh serta berkaitan erat dengannya sehingga perubahan yang terjadi pada dirinya itu menciptakan arus, gelombang, atau paling sedikit riak yang menyentuh orang-orang lain. Demikianlah, pembinaan individu berbarengan dengan pembinaan masyarakat dan dalam saat yang sama, keduanya saling menunjang. Pribadi-pribadi tersebut menunjang terjadinya masyarakat dan masyarakat pun mewarnai pribadi-pribadi itu dengan warna yang memilikinya.

Karena pentingnya kaitan pribadi-pribadi dengan masyarakat, dan karena Al-Quran sejak semula bertujuan mengubah masyarakat, yang berbicara tentang tanggung jawab kolektif (masyarakat) di samping tanggung jawab pribadi sebagaimana ia berbicara tentang ajal (batas usia) manusia dan ajal masyarakat. Perbuatan manusia yang tidak berkaitan dengan masyarakatnya dicatat dalam kitab amalan pribadinya. Di samping itu, ada pula kitab amalan yang dinisbahkan kepada masyarakat dan yang harus

<sup>41</sup> Zainal Abidin dan Agus Ahmad Safe'i, *Sosiosophologi: Sosiologi Islam Berbasis Hikmah*, hlm. 183.



dipertanggungjawabkan berkaitan dengan orang-orang lain (masyarakat).<sup>42</sup>

c. Al-Inshiqaq ayat 19

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

... “*Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)...*”

Walaupun berbicara dalam konteks perkembangan manusia, namun ayat tersebut dapat dipahami dan dimengerti dalam segala aspek kehidupan. Tingkat demi tingkat dalam artian proses berjalan sedikit demi sedikit. Tidak ada kamusnya seseorang untuk langsung dapat melakukan sesuatu seluruhnya dan dalam lintasan waktu semuanya. Oleh karena itu, tujuan akan tercapai melalui proses *step by step*. Manusia untuk dapat merubah kondisi sosial ekonominya maka harus melewati segala sesuatu yang sedikit demi sedikit dan tidak langsung.<sup>43</sup>

IAIN PURWOKERTO

<sup>42</sup> Zainal Abidin dan Agus Ahmad Safe'i, *Sosiophologi: Sosiologi Islam Berbasis Hikmah*, hlm. 183-184.

<sup>43</sup> Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2012), hlm. 18.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Menurut Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Sugiono mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Suriasumantri menyebutkan metode keilmuan itu merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.<sup>1</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana penulis mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup> Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis *deskriptif*. Metode analisis *deskriptif* yaitu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (Seseorang, Lembaga, Masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana

---

<sup>1</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 30.

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet V., (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 23.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 392.

adanya.<sup>4</sup> Penelitian ini dimulai dengan mencari data tentang kebijakan pertambangan di Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang menimbulkan desa Gunung Wetan memiliki izin usaha pertambangan. Untuk selanjutnya, peneliti mengamati kegiatan pertambangan yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Gunung Wetan dengan mencari data-data yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada bagaimana dampak kebijakan pertambangan batuan di desa Gunung Wetan, apakah berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Gunung Wetan atau tidak.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas pada tanggal 1 Maret 2018 sampai 1 Mei 2018. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena desa tersebut terdapat usaha pertambangan di setiap tahunnya dengan titik lahan yang berbeda. Bukan hanya itu, dampaknya juga dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Gunung Wetan.

## **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data variabel yang dipermasalahkan.<sup>5</sup> Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yaitu para pekerja tambang. Objek penelitian adalah *variable* yang diteliti oleh penulis. Objek dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pertambangan Batuan dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.

Untuk memudahkan proses perolehan data, penulis menggunakan penetapan *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek didasarkan atas adanya tujuan tertentu bahwa orang tersebut yang dianggap

---

<sup>4</sup> Soejono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta 1997), hlm. 23.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.200.

paling tahu untuk mendapatkan data yang kita harapkan, diantaranya yaitu Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas, Kepala Desa Gunung Wetan, Pemilik Tambang dan Para Pekerja Tambang. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan. Menurut Lincoln dan Guba, dalam penelitian naturalistik, spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ciri-ciri khusus sampel *purposive*, yaitu *emergent sampling design* atau sementara, *serial selection of sample units* atau menggelinging seperti bola salju (*snow ball*), *continuous adjustment or 'focusing' of the sample* atau disesuaikan dengan kebutuhan dan *selection to the point of redundancy* atau dipilih sampai jenuh.<sup>6</sup>

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel dipilih sampai jenuh, yaitu masyarakat desa Gunung Wetan yang bekerja di sektor pertambangan sebanyak 59 orang diantaranya 34 orang sebagai buruh pemecah batu dan 25 orang sebagai buruh bongkar muat dengan pertimbangan bahwa mereka dapat memberikan data tentang dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pertambangan di Desa. Dengan cara demikian, maka peneliti dapat mendapatkan data. Sample jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.<sup>7</sup>

Dari sample tersebut, peneliti memiliki kriteria dalam penentuan sampel untuk memperoleh data, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan subjek sampel awal yaitu Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas, Kepala Desa Gunung Wetan dan Pemilik Tambang untuk dapat memperoleh data tentang kebijakan pertambangan batuan.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 393.

<sup>7</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 88.

2. Pemilihan sampel, teknik kedua ini merupakan pemilihan sampel lanjutan yang berfungsi untuk memperluas deskripsi informasi yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lengkap mengenai dampak kebijakan pertambangan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bagian yang dijadikan sampel adalah masyarakat desa Gunung Wetan yang bekerja di sektor pertambangan sebanyak 59 orang diantaranya 34 orang sebagai buruh pemecah batu dan 25 orang sebagai buruh bongkar muat.

#### **D. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data *sekunder*, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara kepada beberapa pihak yang dapat memberikan data langsung secara personal. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kantor Dinas terkait yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas, Kepala Desa Gunung Wetan pemilik tambang dan masyarakat Desa Gunung Wetan yang bekerja di sektor pertambangan sebanyak 59 orang diantaranya 34 orang sebagai buruh pemecah batu dan 25 orang sebagai buruh bongkar muat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder seperti Laporan Akhir Pemetaan Zonasi Wilayah Pertambangan Andesit di Desa Gunung Wetan, Dokumen Studi Kelayakan dan Sarana Prasarana Bahan Galian Non Logam (Basalt) di Desa Gunung Wetan. Sumber

---

<sup>8</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 84-85.

<sup>9</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 85.

tersebut merupakan dokumen hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Data Kependudukan oleh Balai Desa Gunung Wetan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>10</sup> Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>11</sup> Disini penulis mendatangi secara langsung objek yang diteliti. Yaitu di Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang memiliki usaha pertambangan. Guna memperoleh data-data yang diperlukan berkenaan dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan pertambangan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan.

### 2. Wawancara

Esterbeg mendefinisikan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>12</sup> Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti.<sup>13</sup> Wawancara

<sup>10</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>11</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 104.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta CV,2014), hlm. 410-411.

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid II* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 218.

yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yang mana peneliti membuat atau menyusun daftar pertanyaan yang kemudian dijadikan panduan dalam melakukan wawancara.<sup>14</sup>

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur, yaitu secara tatap muka (*face to face*) kepada Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas, Kepala Desa Gunung Wetan, pemilik tambang dan pekerja tambang sebanyak 59 orang diantaranya 34 orang sebagai buruh pemecah batu dan 25 orang sebagai buruh bongkar muat. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data terkait mengenai kebijakan pertambangan batuan di desa dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Gunung Wetan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi yang berbentuk tulisan seperti hasil laporan dari Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas tentang pertambangan, Statistik Daerah Kecamatan Jatilawang dan Data Kependudukan Desa Gunung Wetan. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang kebijakan mengenai usaha pertambangan batuan di desa Gunung Wetan dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

## F. Alat Keabsahan Data (Trianggulasi)

Trianggulasi adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam hal trianggulasi, Susan Stainback menyatakan bahwa *“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s*

<sup>14</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung:Refika Aditama, 2012), hlm. 313.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta CV,2014), hlm. 422.



*understanding of what ever is being investigated*". Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Jenis-jenis triangulasi yaitu terdiri dari:

1. Triangulasi teknik adalah uji keabsahan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan bermacam-macam cara seperti observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi pada sumber yang sama.
2. Triangulasi sumber adalah uji keabsahan data dengan menggunakan sumber pengumpulan data, yaitu satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data.

Selanjutnya Mathinson mengemukakan bahwa "*the value of triangulation lies in providing evidence – whether convergent, inconsistent, or contradictory*". Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Menurut Patton, dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan hanya satu pendekatan.<sup>16</sup>

Diharapkan dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Mekanismenya adalah dengan cara membandingkan hasil data dari masing-masing subyek penelitian seperti Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas, Kepala Desa Gunung Wetan, pemilik tambang dan pekerja tambang melalui pengumpulan data yang telah dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan dengan menggunakan teknik ini, penulis memperoleh kevalidan atau kekuatan data terkait bagaimana dampak kebijakan pertambangan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm. 423-425.



batuan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

## G. Teknik Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data antara lain:

### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

### 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 427-438.

## BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Desa Gunung Wetan

#### 1. Letak Geografis dan Potensi Desa Gunung Wetan

Desa Gunung Wetan merupakan salah satu dari 11 desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Jatilawang dan secara astronomis, desa Gunung Wetan terletak antara 7°33'5,22" – 7°34'42,4" Lintang Selatan (LS) dan 109°4'33,7" – 109°6'49,5" Bujur Timur (BT). Desa Gunung Wetan berada di sebelah selatan Ibu kota Kecamatan Jatilawang dengan jarak 7 kilometer, dengan luas wilayah 736,15 Ha. Adapun batas-batas wilayah desa Gunung Wetan yaitu:

- a. Sebelah Utara: Desa Bantar Kecamatan Jatilawang dan Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang
- b. Sebelah Timur: Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang
- c. Sebelah Selatan: Desa Keleng Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
- d. Sebelah Barat: Desa Pengadegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.<sup>1</sup>

Desa Gunung Wetan memiliki potensi sumber daya yang cukup melimpah. Mayoritas masyarakat desa memanfaatkan potensi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai mata pencaharian utama di desa. Potensi yang dimiliki oleh Desa Gunung Wetan yaitu di bidang pertanian dan pertambangan. Di bidang pertanian, masyarakat desa mengolah sawah tadah hujan, dimana jenis pengairannya memanfaatkan air hujan sebagai sumber irigasi sawah. Dimana pertanian ini memiliki dua musim tanam padi yaitu bulan Januari – April dan Mei – Agustus dengan rata-rata lama waktu tumbuh padi hingga panen  $\pm$  110 hari sehingga akhir Februari sampai pertengahan Maret menjadi pekan panen raya untuk

---

<sup>1</sup> Data Kependudukan desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Tahun 2017.

periode tanam pertama dan pekan 3 – 4 pada Juni untuk periode tanam kedua.<sup>2</sup>

Luas sawah yang dimiliki oleh Desa Gunung Wetan hanya 82,8 Ha dan luas tanah darat yaitu 489,94 Ha.<sup>3</sup> Dengan luas lahan pertanian yang sempit tersebut, masyarakat Desa Gunung Wetan mampu memanfaatkan lahan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dibandingkan dengan luas lahan darat yang lebih luas dari tanah sawah, namun masyarakat Desa Gunung Wetan kurang mampu memanfaatkannya. Luas tanah darat digunakan menjadi kebun atau tegalan seluas 450 Ha, perkebunan rakyat seluas 20 Ha dan hutan rakyat seluas 100 Ha.<sup>4</sup>

Tegalan merupakan lahan kering yang ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan, seperti padi ladang, palawija, dan hortikultura. Tanah ini tidak menggunakan sistem irigrasi sebagai sistem pengairannya, namun memanfaatkan air hujan. Dengan keadaan seperti ini, masyarakat Desa Gunung Wetan memanfaatkan tanah tegalan sebagai lahan pertanian yang tidak membutuhkan perawatan khusus seperti singkong, ubi-ubian, kacang-kacangan dan lainnya yang dapat dijual kepada tengkulak yang datang ke desa.

Untuk perkebunan rakyat seluas 20 Ha dijadikan sebagai lahan pertanian dengan sistem bertani bergilir setiap tahunnya. Artinya, siapa saja masyarakat desa Gunung Wetan yang ingin berkebun, dapat berkebun di lahan perkebunan rakyat dengan catatan bergilir atau bergantian dengan lainnya selama waktu yang telah ditentukan. Sedangkan untuk hutan rakyat ditanami pohon pinus maupun jati yang dapat diambil hasilnya untuk dapat dijual kembali. Yaitu pohon pinus dimanfaatkan getahnya sedangkan pohon jati dimanfaatkan ranting serta daunnya untuk keperluan sehari-hari oleh masyarakat desa.

Berdasarkan penggunaannya, luas wilayah tersebut sebagian besar merupakan tanah pertanian berupa persawahan dan tegalan yang

---

<sup>2</sup> Statistik Daerah Kecamatan Jatilawang Tahun 2016.

<sup>3</sup> Data Kependudukan desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Tahun 2017.

<sup>4</sup> Kecamatan Jatilawang Dalam Angka 2017.

mengandalkan air hujan. Hal ini sangat kurang produktif terhadap peningkatan kesejahteraan petani dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Setelah terdapat kebijakan pertambangan, bahwa Desa Gunung Wetan memiliki potensi batuan yang dapat dijadikan sebagai komoditas tambang. Maka tanah tegalan yang tidak begitu produktif, dapat dijadikan sebagai pertambangan untuk dapat diambil manfaatnya guna kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Wetan. Hal ini terlihat dari data survei lapangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas tahun 2016, potensi sumber daya batuan yang tersebar di Kabupaten Banyumas meliputi: Basalt, Sirtu, Andesit, Granodlorit, Batukapur, Lempung, dan Breksi Andesit.<sup>5</sup> Untuk batuan basalt sendiri dapat ditemukan di Kecamatan Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Somagede, Banyumas, Lumbir, Tambak, Kemranjen dan Wangon dengan cadangan sebesar 21.511.646 Ton.<sup>6</sup>

Adanya data tersebut, menyebutkan bahwa Kecamatan Jatilawang memiliki potensi batuan basalt termasuk Desa Gunung Wetan sendiri memiliki potensi tersebut untuk dapat dijadikan sebagai komoditas pertambangan. Berdasarkan ciri-ciri litologi desa Gunung Wetan, potensi jenis batuan serta keseragaman gejala-gejala batuan yang diamati di lapangan, maka secara keseluruhan batuan yang menempati Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang adalah satuan lempung pasir, satuan batuan piroksen diorit dan batuan piroksen basalt.<sup>7</sup> Batuan tersebut kerap digunakan sebagai bahan baku dalam industri poles, bahan bangunan atau pondasi rumah, gedung, jalan, jembatan, dan lainnya.

---

<sup>5</sup> Data Survei Lapangan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.

<sup>6</sup> [www.esdm.banyumaskab.go.id](http://www.esdm.banyumaskab.go.id) diakses pada hari Rabu 7 Februari 2018 pukul 08.00 WIB.

<sup>7</sup> Laporan Akhir Pemetaan Zonasi Wilayah Pertambangan Andesit di Desa Gunung Wetan Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.

## **2. Letak dan Jumlah Pertambangan Batuan**

Dengan potensi batuan yang dimiliki oleh Desa Gunung Wetan, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas mengizinkan Desa Gunung Wetan untuk dapat mendirikan usaha pertambangan batuan. Kebijakan yang diberikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas adalah memberikan jangka waktu kepada usaha pertambangan, sekitar 1 sampai 3 tahun dibukanya operasi usaha pertambangan. Dengan adanya kebijakan tersebut dan potensi yang dimiliki, maka desa Gunung Wetan memiliki usaha Pertambangan Batuan di beberapa titik tempat.

Adapun jumlah pertambangan di Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang ini kalau di totalkan jumlahnya baik yang masih aktif beroperasi maupun yang sudah tidak aktif lagi ada 9 titik tempat pertambangan batuan. Usaha pertambangan yang sudah tidak aktif lagi ada 7 titik, ini karena masa izin usaha sudah berakhir, 1 titik tempat pertambangan yang masih aktif dan 1 titik pertambangan yang baru dibuka. Pertambangan yang sudah tidak aktif lagi ini meninggalkan permasalahan, diantaranya yaitu bekas lokasi pertambangan dibiarkan terbengkalai begitu saja sehingga membuat lahan tidak produktif lagi secara permanen. Pertambangan yang masih aktif sangat dapat dirasakan dampaknya baik sosial maupun ekonomi terhadap kehidupan masyarakat Desa Gunung Wetan.

## **3. Keadaan Demografis**

Jumlah penduduk Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang yaitu 7.113 jiwa yang terbagi atas jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.533 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3.580 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.491 Kepala Keluarga (KK). Desa Gunung Wetan terbagi atas 2 dusun yaitu 4 Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk di desa tak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Terbatasnya pekerjaan di desa menyebabkan masyarakat desa hanya

memanfaatkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Hal ini dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**  
**Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang**

<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Prosentase (%) Jumlah Penduduk</b>
Petani	3.160	44,43%
Buruh Tani	2.550	35,85%
Usaha Rumah Tangga	25	0,35%
Pengusaha	42	0,59%
Buruh Industri	664	9,34%
Pedagang	115	1,62%
Jasa Angkutan	62	0,87%
PNS/TNI/POLRI	4	0,06%
Pensiunan	2	0,03%
Buruh Bangunan	479	6,73%
Kepala Desa/Perangkat	10	0,14%

*Sumber: Olahan Data Sekunder Kantor Balai Desa Gunung Wetan, Tahun 2017*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Gunung Wetan yang berjumlah 7.113 jiwa sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 3.160 orang, buruh tani sebanyak 2.550 orang, usaha rumah tangga 25 orang, pengusaha sebanyak 42 orang, buruh industri sebanyak 664 orang, pedagang 115 orang, jasa angkutan sebanyak 62 orang, PNS/TNI/POLRI sebanyak 4 orang, pensiunan 2 orang, buruh bangunan 479 orang dan Kepala Desa dan Perangkat 10 orang.

Dengan keadaan seperti ini, mayoritas masyarakat Desa Gunung Wetan sebanyak 80,78% bekerja di sektor pertanian, yaitu 44,43% sebagai petani dan 35,85% sebagai buruh tani. Mereka mengolah lahan pertanian yang terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lahan pertanian yang kurang produktif karena luas lahan yang sedikit dan hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairan pertaniannya, maka hal ini menyebabkan petani Desa Gunung Wetan tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya. Hal demikian yang menyebabkan petani desa Gunung

Wetan kurang sejahtera jika dilihat dari pekerjaannya. Pendapatan di sektor pertanian juga tidak menentu karena hanya mengandalkan musim tanam dan panen saja. Untuk waktu-waktu tertentu, petani dan buruh tani tidak dapat bekerja atau menjadi pengangguran musiman.

Dari tingkat pendidikannya, penduduk Desa Gunung Wetan yang berjumlah 7.113 Jiwa sebagian besar berpendidikan tamat SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan sebagian kecil Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gunung Wetan**  
**Kecamatan Jatilawang**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
Belum Sekolah	418	5,87%
Tidak Tamat SD/Sederajat	385	5,41%
Tamat SD/Sederajat	2.815	39,57%
Tamat SMP/Sederajat	2.595	36,48%
Tamat SMA/Sederajat	886	12,46%
Tamat Diploma	10	0,14%
Tamat Sarjana	4	0,06%

*Sumber: Olahan Data Sekunder Kantor Balai Desa Gunung, Tahun 2017*

Banyaknya penduduk menurut pendidikan di Desa Gunung Wetan diantaranya yaitu, belum sekolah sebanyak 418 orang atau sebesar 5,87%, tidak tamat SD/ sederajat 385 orang atau sebesar 5,41%, tamat SD/ sederajat yaitu 2.815 orang atau sebesar 39,57%, tamat SMP/ sederajat yaitu 2.595 orang atau sebesar 36,48%, tamat SMA/ Sederajat yaitu 886 orang atau 12,46%, tamat Diploma sebanyak 10 orang atau sebesar 0,14% dan tamat Sarjana yaitu 4 orang atau sebesar 0,06%.

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang masih belum cukup tinggi sehingga harus lebih ditingkatkan lagi karena bagaimana juga tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Dan dengan banyaknya penduduk yang



berpendidikan tinggi ini maka akan tercipta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing dengan penduduk lainnya sehingga akan tercipta pembangunan serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Rendahnya tingkat pendidikan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Wetan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Wetan masih dikatakan rendah. Tolak ukur kesejahteraan masyarakat bukan hanya dapat dilihat dari pekerjaan dan pendapatannya saja, tetapi juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan seseorang. Jika seseorang berpendidikan tinggi, maka pilihan lapangan kerja terbuka lebih luas karena mereka memiliki keahlian sesuai dengan pendidikannya. Namun dengan keadaan pendidikan penduduk yang rendah, menyebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan tak heran jika di Desa Gunung Wetan masih terdapat pengangguran.

Dengan keadaan seperti ini, masyarakat Desa Gunung Wetan hanya memanfaatkan potensi alam yang ada yaitu di sektor pertanian. Namun, setelah adanya kebijakan pertambangan di desa Gunung Wetan, menyebabkan desa Gunung Wetan dapat memanfaatkan potensi alam yang ada selain di sektor pertanian. Potensi batuan yang melimpah, dapat dimanfaatkan menjadi komoditas pertambangan yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Gunung Wetan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Kebijakan Pertambangan Batuan Di Desa Gunung Wetan**

Pemerintah dalam mengelola mineral batubara dan hasil bumi lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan persetujuan DPR RI. Ada dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Landasan filosofis atau pertimbangan hukum di tetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan



Batubara, yaitu bahwa Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Pertambangan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Khususnya pertambangan batuan yang menghasilkan hasil tambang berupa batuan yang sangat dibutuhkan untuk pendirian suatu bangunan. Ini semua sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluknya di bumi. Negara sebagai penguasa hanya memberikan peraturan pada pengelolaan pertambangan demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Kabupaten Banyumas sendiri dalam mengelola mineral batubara dan hasil bumi lainnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Kabupaten Banyumas sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan Bupati Banyumas. Maksud dibuatnya Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah. Tujuan pengelolaan mineral dan batubara di Daerah adalah :

- a. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat;

- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.<sup>8</sup>

Jenis usaha pertambangan di Desa Gunung Wetan merupakan usaha pertambangan Batuan karena bahan galian tambang di Desa Gunung Wetan adalah Basalt, Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas bahwa batu basalt merupakan golongan pertambangan batuan. Penambangan batuan, dulu termasuk kategori bahan galian golongan C berdasarkan istilah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pada pasal 3 disebutkan, (1) bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan: (a) golongan bahan galian strategis (b) golongan bahan galian vital (c) golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b. Butir (c) pada pasal itu, yang kemudian populer sebagai “bahan galian golongan C” atau “galian C”.

Namun sekarang, istilah itu sebenarnya tak relevan lagi. Mengutip Parlindungan Sitinjak, Staf pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, yang dimuat di laman Kementerian ESDM pada 2011, istilah ini sudah tak tepat lagi digunakan. “Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, menjadi “batuan”, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi “batuan”.<sup>9</sup>

Pemerintah Desa Gunung Wetan tidak memiliki kebijakan khusus dalam suatu usaha pertambangan. Usaha pertambangan seluruhnya di atur oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas. Pemerintah Desa Gunung Wetan hanya memberikan kebijakan peraturan desa yang mengatur hubungan sosial masyarakat dengan pengusaha tambang. Dimana masyarakat dimintai persetujuan dibukanya usaha tambang di desa. Namun demikian, jika masyarakat menolak akan adanya

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Aos, *Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas*, tanggal 22 November 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup> [www.beritagar.id](http://www.beritagar.id) diakses pada hari selasa, 20 Maret 2018 pukul 15.55 WIB.

usaha pertambangan namun pada pihak Dinas ESDM menyetujuinya dengan alasan bahwa pertambangan tersebut tidak membahayakan masyarakat dan aman dari bencana alam seperti longsor dan banjir, maka perusahaan pertambangan tersebut tetap lolos izin dan tetap dapat berdiri walaupun tanpa ada persetujuan masyarakat sekitar lahan tambang. Jika pemerintah desa bersikukuh tidak memberikan izin untuk mendirikan pertambangan, maka hal ini sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Hal ini dikarenakan, hasil tambang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Desa hanya memberikan kebijakan wewenang yang mengatur hubungan sosial masyarakat, selebihnya di atur oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal tata ruang, prosedur, peraturan dan lainnya. Di desa Gunung Wetan hanya memiliki dua pertambangan yang masih aktif yaitu pertambangan UD. Naga Liar milik Sundiarjo Naswin dan pertambangan milik bapak Kartono yang baru dibuka. Pertambangan ini sangat memberikan manfaat yang positif untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa Gumung Wetan.<sup>10</sup>

Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan kebijakan berupa peraturan dalam pengelolaan usaha pertambangan di suatu daerah yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas Pasal 1 Ayat 13, bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>11</sup> Tahap-tahap kegiatan pertambangan tersebut ditetapkan oleh Dinas ESDM Kabupaten

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Kidam, *Kepala Desa Gunung Wetan*, tanggal 25 April 2017 pukul 16.00 WIB.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Banyumas dalam pengelolaan usaha pertambangan yaitu sebagaimana berikut:

a. Penyelidikan Umum

Penyelidikan umum bertujuan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi di lahan yang akan di tambang. Dalam konteks ini, khususnya penambang Desa Gunung menggunakan penyajian informasi data seperti peta topografi dan peta geologi yang disajikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas sebagai awal dari penyelidikan umum. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan Surat Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dimana surat tersebut sangat berguna untuk mengetahui keadaan suatu lahan yang akan dibuat pertambangan.

Kondisi geologi menunjukkan potensi sumber daya batuan yang tersebar di Kabupaten Banyumas meliputi : Basalt, Sirtu, Andesit, Granodlorit, Batukapur, Lempung, dan Breksi Andesit.<sup>12</sup> Untuk batuan basalt sendiri dapat ditemukan di Kecamatan Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Somagede, Banyumas, Lumbir, Tambak, Kemranjen dan Wangon dengan cadangan sebesar 21.511.646 Ton.<sup>13</sup>

b. Eksplorasi

Eksplorasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya potensi batuan. Hal pertama yang dilakukan oleh pengusaha tambang yaitu mereka menyurvei lokasi dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Setelah diketahui lahan tersebut memiliki kandungan batuan baru diadakan negoisasi pembelian lahan dan selanjutnya membuat surat perizinan usaha pertambangan (IUP) untuk dapat mendirikan tempat lokasi pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.<sup>14</sup> Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> Data Survei Lapangan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.

<sup>13</sup> [www.esdm.banyumaskab.go.id](http://www.esdm.banyumaskab.go.id) diakses pada hari Rabu 7 Februari 2018 pukul 08.00 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Kidam, *Kepala Desa Gunung Wetan*, tanggal 25 April 2017 pukul 16.00 WIB.

mendapatkan Surat Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas.

c. Biaya Eksplorasi dan Perizinan

Ketentuan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha tambang untuk dapat membuka lahan pertambangan ditentukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas. Yaitu diantaranya adalah biaya yang dipersiapkan untuk perizinan adalah sebesar Rp 84.000.000,00 termasuk di dalamnya biaya retribusi perizinan, biaya pendukung pemenuhan persyaratan permohonan perizinan seperti pernyataan tidak keberatan dari tetangga dan pemilik lahan. Biaya pengujian geolistik, biaya laboratorium analisis UKL, UPL dan biaya-biaya lainnya yang merupakan dokumen perijinan sebesar Rp 26.637.073,00.<sup>15</sup> Rincian biaya ekplorasi dan perizinan dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 7.**  
**Biaya Persiapan Pembukaan Lahan Tambang**

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Biaya/unit</b>
a. Biaya Eksplorasi	
- Survey	Rp 500.000,00
- Pemetaan	Rp 2.137.073,00
- Studi kelayakan	Rp 9.000.000,00
- Studi UKL-UPL	Rp 15.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 26.637.073,00</b>
b. Biaya Perizinan	
- Surat Izin Tempat Usaha	Rp 15.000.000,00
- Surat Izin Gangguan	Rp 10.000.000,00
- Surat Izin Pemakaian Jalan	Rp 15.000.000,00
- Retribusi WIUP	Rp 12.000.000,00
- Surat Usaha Perdagangan	Rp15.000.000,00
- Surat Izin Jaminan	Rp 7.000.000,00

<sup>15</sup> Dokumen Studi Kelayakan dan Sarana Prasarana Bahan Galian Non Logam (Basalt) di Desa Gunung Wetan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.

Kepala Desa	
- Surat Izin Persetujuan Tetangga	Rp 5.000.000,00
- Surat Izin Membangun Bangunan	Rp 5.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 84.000.000,00</b>
c. Pemilikan Lahan	
- Pembebasan tanah + pohon (area prospek)	357.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 357.000.000,00</b>
<b>Total Biaya Eksplorasi + Biaya Perizinan + Pemilikan Lahan</b>	<b>Rp 467.637.073,00</b>

Sumber: Olahan Data Sekunder Dokumen Dinas ESDM Kab. Banyumas

#### d. Studi Kelayakan

Analisis kelayakan yang dilakukan terhadap kegiatan pertambangan batuan basalt bertujuan untuk mengurangi resiko kegagalan suatu kegiatan pertambangan. Dalam hal ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas sangat memperhatikan studi kelayakan pertambangan dalam hal keamanan lahan, apakah lahan tersebut tidak berpotensi menimbulkan bencana yang dapat membahayakan masyarakat ataukah tidak. Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap sebelumnya dalam proses pendirian usaha pertambangan.

#### d. Konstruksi

Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. Pembangunan fasilitas produksi pada usaha pertambangan di tanggung sendiri oleh pengusaha tambang bukanlah desa, seperti sarana jalan transportasi dan biaya reklamasi lahan pasca tambang ditanggung oleh pengusaha tambang. Biaya untuk konstruksi sarana jalan transportasi yaitu di tanggung oleh pengusaha tambang jika terjadi kerusakan yang di akibatkan oleh usaha pertambangan itu sendiri. Sedangkan biaya untuk jaminan reklamasi adalah sebesar Rp 35.000.000,00 yang di berikan kepada Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral untuk mengelolanya. Hal ini merupakan langkah awal dalam pengendalian dampak lingkungan yang akan terjadi akibat aktivitas pertambangan.<sup>16</sup>

e. Penambangan

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral atau batubara dan mineral ikutannya. Di dalam pertambangan tersebut, khususnya Desa Gunung Wetan dalam memproduksi mineral batuanya hanya memiliki 3 proses penambangan yaitu:

- 1) Batu diambil melalui alat berat dengan menggunakan excavator. Batu tersebut masih berupa bongkahan batu besar yang dinamakan batu boulder.
- 2) Batu boulder itu dapat langsung dijual dengan harga satuan per ton sedangkan batu boulder yang dipecah menjadi beberapa bagian oleh para pekerja buruh pemecah batu dengan menggunakan alat yang masih sangat sederhana yaitu dengan menggunakan palu besar untuk memecah batu menjadi beberapa bagian.
- 3) Setelah pecah menjadi beberapa bagian, batu tersebut dinamakan batu belah dan dapat dijual kepada truck pengangkut yang datang dari luar untuk membeli hasil produksi dengan harga jual satuan per muatan dump truck.<sup>17</sup>

f. Pengangkutan

Pengangkutan batuan hasil produksi pertambangan dilakukan menggunakan dump truck pengangkut batuan yang datang dari luar untuk membeli batuan yang ada di pertambangan. Mereka datang untuk membeli hasil produksi batuan dengan tujuan mengisi pesanan supplier seperti masyarakat karna kebutuhan untuk bangunan rumah

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Kidam, *Kepala Desa Gunung Wetan*, tanggal 25 April 2017 pukul 16.00 WIB.

<sup>17</sup> Olahan data primer, *wawancara dengan pekerja tambang Desa Gunung Wetan*, bulan Mei 2018.

maupun mengisi Proyek besar pada sebuah PT, seperti PLTU yang ada di Cilacap.<sup>18</sup>

g. Penjualan

Hasil pertambangan berupa batu basalt di jual di dalam dan di luar daerah kabupaten Banyumas dengan cara para pembeli mendatangi langsung ke tempat penambangan. Harga jual produk pertambangan yaitu seharga Rp 400.000,00 per dump truck pengangkut untuk batu belah dan Rp 30.000,00 per ton untuk batu boulder. Harga jual ditetapkan oleh pengusaha tambang sendiri dengan potongan untuk membayar buruh pemecah batu per dump truck pengangkut sebesar Rp 70.000,00.<sup>19</sup>

Penjualan hasil tambang dilakukan oleh penjual yaitu produsen (penambang) kepada pembeli yang dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

**Gambar 1.**  
**Skema Penjualan Hasil Tambang**



*Sumber: Olahan Data Primer*

<sup>18</sup> Olahan data primer, wawancara dengan pekerja tambang Desa Gunung Wetan, bulan Mei 2018.

<sup>19</sup> Olahan data primer..., bulan Mei 2018.



Dalam kegiatan jual beli bahan galian, umumnya kontraktor akan langsung berhubungan dengan pemilik tambang dan menjual hasil tambang kepada pemerintah maupun swasta. Begitupula dengan masyarakat umum, mereka akan langsung datang ke lokasi penambangan untuk membeli secara langsung dan sangat kecil dijumpai yang membeli dari perusahaan bangunan. Bahan galian bisa di antarkan oleh supir ataupun pembeli dapat membawa kendaraan sendiri untuk melakukan pemuatan bahan galian. Dalam hal ini supir mempunyai peranan cukup penting dalam suplier pemasaran bahan galian tambang batu basalt kepada kontraktor proyek pembangunan dan perusahaan bahan bangunan.

h. Pasca Tambang

Para pengusaha tambang telah memberikan jaminan pasca tambang sejumlah Rp 35.000.000,00 untuk reklamasi lahan menjadi lahan yang siap produktif kembali.<sup>20</sup> Jumlah lahan pasca tambang terdapat 7 titik, namun lahan pasca pertambangan tersebut masih dibiarkan terbengkalai di Desa Gunung Wetan. Hal ini menyebabkan lahan menjadi tidak produktif lagi, karena lahan tersebut diselimuti oleh rumput-rumput liar dan tebing curam bekas pertambangan yang rawan akan longsor akibat tidak adanya akar pohon yang menopang tanah batuan tersebut. Bukan hanya itu, kekeringan sumber mata air di desa pun terjadi.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Kidam, *Kepala Desa Gunung Wetan*, tanggal 25 November 2017 pukul 16.00 WIB.

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Wetan



**Gambar 2.** Dokumentasi Masyarakat petani Desa Gunung Wetan

Manaso Malo menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai adanya saling kenal mengenal antar satu dengan yang lain, paguyuban, sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan.<sup>21</sup> Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan dapat dilihat dari bagaimana hubungan sesama anggota masyarakatnya. Masyarakat Desa Gunung Wetan selain masih mengandalkan alam sebagai kegiatan ekonomi, hubungan yang terjalin diantara warganya masih sangat erat. Diantaranya yaitu pola perilaku masyarakat Desa Gunung Wetan yang memiliki rasa kebersamaan, paguyuban, saling mengenal, gotong royong dan kekeluargaan.

Hal ini terbentuk karena bentuk pemukiman masyarakat Desa Gunung Wetan yang pada umumnya membentuk pola bergerombol dan berdekatan satu sama lain. Rumah-rumah di pedesaan antara satu dengan rumah yang lain jaraknya berdekatan, bahkan biasanya dalam satu pekarangan terdapat lebih dari satu rumah tangga, terdiri dari kumpulan

---

<sup>21</sup> Basrowi dan Siti Juariyah , ”Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur”, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010.*

beberapa rumah tangga yang membentuk keluarga besar. Rumah tersebut terdiri dari beberapa keluarga batih yang hubungannya dekat sekali. Unit pemukiman tersebut terbagi ke dalam petak-petak tanah yang merupakan kesatuan rumah tempat tinggal yang memanjang dan bergerombol mengikuti di setiap petak tanahnya. Pemukiman di Desa Gunung Wetan biasanya terdapat jalan-jalan desa di mana rumah penduduk menghadap ke jalan tersebut.

Karena status masyarakat Desa Gunung Wetan sebagai petani, maka ukuran keadaan sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari sisi finansialnya yaitu melalui penguasaan tanah di desa. Sama halnya dengan pendapat Sajogyo bahwa perbedaan status seseorang dalam masyarakat bertani ditentukan oleh pola penguasaan lahan, modal, teknologi, dan luasnya lahan pemilikannya.<sup>22</sup> Seseorang yang memiliki penguasaan tanah yang luas maka dapat dikatakan taraf hidup orang tersebut baik, jika orang tersebut tidak memiliki penguasaan tanah maka orang tersebut dikatakan bertaraf hidup kurang. Seseorang yang memiliki lahan pertanian yang luas maka dapat mempekerjakan yang lainnya sebagai buruh tani. Teknologi pertanian di desa Gunung Wetan juga masih sangat terbatas karena masih menggunakan alat-alat tradisional, yaitu menggunakan tenaga manusia dalam bekerja.

Menurut Talcott Parsons, indikator untuk mengukur kondisi sosial ekonomi dapat dilihat dari bentuk ukuran rumah, keadaan perawatan, tata kebun, wilayah tempat tinggal, pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh seseorang dan sumber pendapatan.<sup>23</sup> Bentuk ukuran rumah masyarakat Desa Gunung Wetan terbagi menjadi rumah gedung, setengah gedung, kayu dan bambu. Semakin besar dan megah ukuran rumah seseorang, maka

---

<sup>22</sup> Basrowi dan Siti Juariyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010*.

<sup>23</sup> Jesi Ratnasari, dkk., "Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi di SMA", *e-Journal Pendidikan Ekonomi FKIP Untan*.

semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang di dalam Desa Gunung Wetan. Bukan hanya itu, kondisi sosial ekonomi juga dapat dilihat dari penguasaan tanah oleh petani yang tidak hanya terbatas pada satu macam tata guna saja. Terdapat dua macam tanah yang dapat diusahakan oleh petani yaitu tanah sawah tadah hujan yang memanfaatkan air hujan sebagai sumber pengairannya dan tanah tegalan.

Tanah tegalan pada umumnya kurang produktif, karena tanah tegalan memanfaatkan air hujan sebagai sumber pengairannya. Maka dari itu, tanaman yang di tanam di tanah tegalan merupakan tanaman yang tidak memerlukan perawatan khusus, diantaranya yaitu cabai, kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang panjang dan kacang-kacang lainnya, ubi jalar, singkong, kelapa, pepaya, mlinjo, pisang, jagung, tanaman sayuran yang memanfaatkan air hujan seperti (cesim, oyong, tomat, terong, timun, kecipir), dan tanaman lainnya.

Hasil dari tanaman tegalan sering kali mempunyai nilai ekonomi yang besar, dengan kata lain hasil-hasil yang didapat dari hasil panennya dapat diperdagangkan dan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari tanah tegalan sebagian besar dipergunakan untuk konsumsi sendiri, walaupun tidak sedikit yang dijual ke pasar atau kepada tengkulak. Tengkulak setiap musim panen tanaman tertentu datang ke desa untuk membeli hasil dari tanah tegalan yang bernilai tinggi bagi petani. Hasil dari tanaman tegalan ini mampu menambah pendapatan keluarga petani. Kehidupan petani tegalan masih menjadi sumber pendapatan yang cukup penting. Pola tanaman tanah tegalan adalah tumpang sari, beberapa jenis tanaman tersebut ditanami pada lahan yang sama. Latar belakang yang mendasari pola tanam tersebut adalah lahan garapan yang sempit dan kondisi perairan pertanian. Keadaan seperti itu membuat para petani memikirkan lahan yang sempit untuk dimanfaatkan secara maksimal agar dapat menghasilkan hasil panen yang efektif.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Olahan data primer, wawancara dengan pekerja tambang desa Gunung Wetan, bulan Mei 2018.

Bukan hanya itu, Menurut Melly G. Tan, untuk melihat kedudukan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan.<sup>25</sup> Dan juga Status kepemilikan, jenis tempat tinggal, status dalam masyarakat serta partisipasi dalam masyarakat.<sup>26</sup> Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan dapat dilihat dari indikator tersebut diantaranya yaitu:

a. Mata Pencaharian

Seperti diketahui masyarakat pedesaan sering diidentikkan sebagai masyarakat agraris, yaitu masyarakat yang kegiatan ekonominya terpusat pada pertanian. Seperti halnya masyarakat desa Gunung Wetan ini yang memang sebagian besar masyarakatnya berstatus pekerja sebagai petani. Sebanyak 80,28% masyarakat desa Gunung Wetan bekerja di sektor pertanian, yaitu sebanyak 44,43% sebagai petani dan 35,85% sebagai buruh tani. Jumlah petani pemilik dengan buruh tani hampir berimbang, disebabkan dalam satu rumah tangga tani, di samping mereka mengerjakan lahannya sendiri terutama yang berlahan sempit, kepala rumah tangganya bekerja sebagai buruh tani. Bukan hanya itu, anggota keluarga tani terutama kaum wanita juga banyak yang menjadi buruh tani yakni dengan membantu mengerjakan lahan orang lain yang membutuhkan tenaga. Mereka yang memperkerjakan buruh tani hanya pada mereka yang berlahan luas.

b. Pendapatan

Pekerjaan utama yang menjadi sumber mata pencaharian rumah tangga di Desa Gunung Wetan adalah di sektor pertanian, karena 80,28% masyarakat Desa Gunung Wetan bekerja di sektor pertanian, yaitu sebanyak 44,43% sebagai petani dan 35,85% sebagai buruh tani.<sup>27</sup> Mereka memiliki sumber pendapatan yang tak menentu karena

---

<sup>25</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 35.

<sup>26</sup> Jesi Ratnasari, dkk., *e-Journal Pendidikan Ekonomi FKIP Untan*.

<sup>27</sup> Data Kependudukan Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang 2017.

bekerja sesuai dengan musim tanam dan panen saja. Di Desa Gunung Wetan hanya terdapat dua musim tanam padi, yaitu bulan Januari – April dan Mei-Agustus dengan rata-rata  $\pm 110$  hari sehingga akhir Februari sampai pertengahan Maret menjadi pekan panen raya untuk periode tanam pertama dan pekan 3-4 pada Juni untuk periode tanam kedua. Desa Gunung Wetan memiliki luas sawah 77 Ha, yang merupakan sawah tadah hujan dimana dalam irigrasi pengairannya hanya memanfaatkan air hujan.<sup>28</sup>

Pendapatan bagi seorang petani sesuai dengan apa yang ia tanam pada luas tanah yang dimilikinya, selain memanfaatkan sawah tadah hujan, mereka juga memanfaatkan kebun tegalan untuk dapat ditanami tanaman yang lain seperti ubi-ubian, sayur-sayuran dan yang lainnya. Pendapatan yang mereka peroleh sesuai dengan hasil pertanian yang mereka jual kepada tengkulak sesuai dengan harga pasar. Sedangkan para buruh tani di desa Gunung Wetan memiliki pendapatan sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Mereka bekerja di sawah dihargai dengan Rp 70.000,00 per hari. Jika ia bekerja di kebun tegalan seperti panen singkong dan bekerja borongan sampai selesai dalam waktu satu hari dihargai sebesar Rp 100.000,00.<sup>29</sup>

#### c. Pendidikan

Kondisi Sosial Ekonomi di dalam masyarakat dapat dilihat dari kedudukan pendidikannya. Pendidikan adalah sistem pengajaran kuktural atau intelektual yang formal atau semi-formal. Kebanyakan masyarakat mempunyai sistem pendidikan yang tidak begitu formal tetapi tidak ada masyarakat yang tidak mengembangkan prosedur untuk menstransmisikan pengetahuan, keterampilan atau nilai generasi berikutnya. Pendidikan akan dapat diperoleh melalui bangku pendidikan yang terfasilitasi seperti sekolah dan lembaga formal

---

<sup>28</sup> Statistik Daerah Kecamatan Jatilawang Tahun 2016.

<sup>29</sup> Olahan data primer, wawancara dengan pekerja tambang desa Gunung Wetan, bulan Mei 2018.



lainnya yang ada di dalam masyarakat. Melalui pendidikan maka seseorang akan memiliki keahlian di setiap bidang yang dapat bersaing di dalam dunia kerja. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin terbuka kesempatan mereka untuk memilih pekerjaan dari berbagai alternatif pekerjaan. Di desa Gunung Wetan hanya memiliki sarana dan prasana pendidikan yang dikatakan cukup rendah karena hanya memiliki sarana pendidikan formal sampai Sekolah Dasar Saja. Untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, harus pergi ke kota kecamatan atau kota besar lainnya. Hal ini dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 8.**  
**Sarana Dan Prasarana Pendidikan Desa Gunung Wetan**  
**Kecamatan Jatilawang Tahun Ajaran 2016/2017**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Murid</b>	<b>Guru</b>	<b>Rasio Murid Terhadap Guru</b>
TK	2	63	3	21
SD	4	612	37	17

*Sumber: Olahan Data Primer BPS Kecamatan Jatilawang 2017*

Rata-Rata masyarakat desa Gunung Wetan Berpendidikan rendah. Mereka yang kurang mampu mungkin hanya menyekolahkan anaknya sampai Sekolah Menengah Atas saja, ada juga yang hanya sampai Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang kemudian dianjurkan untuk bekerja saja. Hal ini dikarenakan adanya persepsi masyarakat bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting dalam mencari pekerjaan. Mereka berpendapat bahwa pekerjaan apa saja yang terpenting mendapatkan uang untuk menaikkan taraf hidup mereka.

Status pendidikan masyarakat Desa Gunung Wetan masih rendah. Karena hanya beberapa yang menempuh bangku Sekolah Menengah Atas. Hal ini dapat dilihat dari data kependudukan Desa Gunung Wetan bahwa jumlah yang tidak tamat SD/Sederajat sebanyak 5,41%, tamat SD/Sederajat sebanyak 39,57%, SMP/Sederajat sebanyak 36,48% dan SMA/Sederajat sebanyak 12,46%, lulus diploma 0,14%

dan sarjana 0,06%.<sup>30</sup> Rendahnya status pendidikan dan sempitnya lapangan pekerjaan di desa membuat masyarakat Desa Gunung Wetan terbatas dalam memilih pekerjaan yang ada. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya masyarakat Desa Gunung Wetan yang menjadi pengangguran atau melakukan urbanisasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan.

Bagi masyarakat yang hidup di desa, mereka hanya memanfaatkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian utama di desa. Jam kerja di pertanian sangat terasa pengalokasiannya bila telah tiba musim tanam dan panen. Sementara itu pada musim-musim tertentu tenaga kerja pertanian sangat tidak produktif karena pertanian di Desa Gunung Wetan hanya memanfaatkan air hujan sebagai bahan pengairan pertaniannya. Hal inilah yang menimbulkan pengangguran musiman di desa.

d. Status kepemilikan

Status kepemilikan masyarakat Desa Gunung Wetan biasanya dapat dilihat melalui aspek kepemilikan tempat tinggal, peternakan dan fasilitas lainnya. Status kepemilikan masyarakat desa dari kepemilikan pribadi dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 9.**  
**Status Kepemilikan Masyarakat Desa Gunung Wetan**

Tempat Tinggal	Bangunan	Rumah	1.406 KK	1.406 KK	
<b>Sub Total</b>				<b>1.406 KK</b>	
<b>Peternakan</b>	Rumah Tangga Peternak	Sapi Biasa	69 KK	69 KK	
		Kambing	215 KK	215 KK	
		Unggas	a. ayam kampung:	216 KK	268 KK
			b. itik: 35 KK		
c. itik					

<sup>30</sup> Data Kependudukan Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang 2017.



			manila: 17 KK	
	<b>Sub Total</b>			<b>552 KK</b>
<b>Fasilitas</b>	Kendaraan	Sepeda Motor	257 orang	257 orang
		Mobil Pribadi	16 orang	16 orang
		Colt/Angkot	7 orang	7 orang
		Truk	12 orang	12 orang
		Sepeda	259 orang	259 orang
		Becak	2 orang	2 orang
		Gerobak Dorong	10 orang	10 orang
<b>Sub Total</b>			<b>563 orang</b>	

Sumber: Olahan Data Primer KC Disnakan Kecamatan Jatilawang 2017

Dari jenis status kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Gunung Wetan dapat dikatakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan tinggi. Karena dari jumlah penduduk sebanyak 7.113 jiwa dan sebanyak 1.491 Kepala Keluarga (KK), status kepemilikan pribadi masyarakat Desa Gunung Wetan masih kurang merata. Hampir seluruh masyarakat Desa Gunung Wetan sebanyak 94,30% Kepala Keluarga Desa Gunung Wetan memiliki rumah, 36,89% Kepala Keluarga memiliki hewan ternak, dan 7,92% masyarakat Desa Gunung Wetan memiliki kepemilikan fasilitas untuk transportasi seperti motor, mobil dan lainnya.

e. Jenis tempat tinggal

Sebanyak 1.491 Kepala Keluarga di Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang, memiliki jenis tempat tinggal yang berbeda. Hal ini dapat membedakan kondisi sosial ekonomi seseorang dengan seseorang lainnya berdasarkan jenis tempat tinggalnya. Kondisi sosial ekonomi seseorang jika dilihat dari jenis rumahnya, tergolong ke dalam kondisi sosial tinggi, sedang, dan rendah menurut perspektif masyarakat. Jenis Tempat Tinggal Masyarakat Desa Gunung Wetan Menurut Jenisnya dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 10.**  
**Jenis Tempat Tinggal Masyarakat Desa Gunung Wetan**

No	Jenis Rumah	Jumlah
1	Gedung	479

2	Sebagian Gedung	193
3	Kayu	462
4	Bambu	272
<b>Total</b>		<b>1406</b>

Sumber: *Olahan Data Primer Monografi Kecamatan Jatilawang 2017*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan jika di lihat dari jenis tempat tinggalnya dikatakan sebagai kondisi sosial ekonomi sedang. Sebanyak 34,07% masyarakat desa Gunung Wetan yang memiliki rumah jenis gedung dari keseluruhan jumlah jenis rumah yang ada di Desa Gunung Wetan. Jumlah tersebut tidak beda jauh dengan masyarakat yang memiliki jenis tempat tinggal dari kayu yaitu sebanyak 30,99%.

f. Status dalam masyarakat

Mayoritas masyarakat Desa Gunung Wetan memiliki status dalam masyarakat berdasarkan achieved status. Achieved status merupakan status yang diperoleh individu melalui kerja keras atau perjuangan. Status ini akan diperoleh individu sesuai prestasinya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam lingkungan masyarakat, individu tidak lagi menyangandng peran dari achieved status-nya.<sup>31</sup> Status seseorang di Desa Gunung Wetan tergantung dari profesi yang ia miliki melalui kerja keras atau perjuangan. Jenis status tersebut meliputi kepala desa, perangkat desa, guru, polisi, TNI. Bidan, ustad, pedagang, pengusaha, petani dan pekerjaan lainnya yang diperoleh melalui kerja keras yang dapat membedakan status sosial ekonomi seseorang di dalam masyarakat.

g. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Gunung Wetan masih dapat dikatakan sangat tinggi. Hal ini di lihat dari cara partisipasi masyarakat Desa Gunung Wetan dalam mengikuti beberapa kegiatan yang ada di desa, baik itu kegiatan sosial maupun adat istiadat. Seperti halnya

---

<sup>31</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 271.

kegiatan hajatan, sedekah bumi, perlon, kerja bakti, Ronda malam, ta'ziah, menjenguk orang sakit, yasinan, sadran dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat di desa, hal ini mewajibkan masyarakat Desa Gunung Wetan untuk dapat berpartisipasi di dalamnya.

### **C. Dampak Kebijakan Pertambangan Batuan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang**

Dengan adanya kebijakan pertambangan, maka Desa Gunung Wetan memiliki usaha pertambangan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif, yaitu terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi pada masyarakat Desa Gunung Wetan. Pertambangan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Gunung Wetan khususnya para buruh tani di desa. Sebanyak 59 masyarakat Desa Gunung Wetan yang bekerja di sektor pertanian beralih profesi dengan merubah mata pencahariannya sebagai buruh tambang. Perubahan kondisi sosial ekonomi ini dapat dilihat sebelum dan sesudah adanya sebuah kebijakan pertambangan, yaitu dilihat dari beberapa aspek seperti peluang berusaha, peningkatan pendapatan, perubahan mata pencaharian, perubahan perilaku masyarakat dan konflik.<sup>32</sup> Sedangkan Emma Hijriati dan Rina Mardiana menambahkan aspek perubahan taraf hidup sebagai indikator perubahan kondisi sosial ekonomi.<sup>33</sup> Serta Yunus menambahkan bahwa aspek perubahan kondisi sosial ekonomi yaitu terjadinya mobilitas penduduk.<sup>34</sup>

Aspek tersebut dipilih menjadi tolak ukur indikator kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan dengan asumsi bahwa aspek

---

<sup>32</sup> Dedek Apriyanto dan Rika Harini, "Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosialekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kartanegara", *e-Journal*.

<sup>33</sup> Emma Hijriati dan Rina Mardiana, "Pengaruh ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhan Sukabumi", *Jurnal Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB ISSN : 2302-7517, VOL.02, No.03*.

<sup>34</sup> Nurma Kumala Dewi dan Iwan Rudiarto, "Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang", *Jurnal Wilayah dan Lingkungan Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, 175-188*.

tersebut sangat mudah dilihat dan diukur secara deskriptif oleh peneliti. Bukan hanya itu, aspek tersebut juga sudah tidak menjadi hal yang asing lagi dalam menentukan tingkat sosial ekonomi seseorang di dalam masyarakat. Karena kebanyakan dari mereka melihat seseorang lainnya untuk mengukur tingkat sosial ekonomi melihat dari aspek tersebut. Hal inilah yang dapat menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan memiliki kondisi sosial ekonomi rendah, sedang maupun tinggi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan berdasarkan aspek tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut:

### 1. Peluang Berusaha

Sebelum adanya kebijakan pertambangan di Desa Gunung Wetan, masyarakat Desa Gunung Wetan masih mengandalkan hasil pertaniannya untuk dapat dijual kepada tengkulak yang datang ke desa atau bekerja di lahan milik orang lain sebagai buruh tani. Hal ini dijadikan oleh masyarakat Desa Gunung Wetan sebagai peluang berusaha mereka. Dengan adanya kebijakan pertambangan, masyarakat Desa Gunung Wetan dapat bersaing secara kompeten untuk dapat mendirikan usaha yang berpeluang karena potensi sumber dayanya yang cukup potensial tersebut. Hal ini terlihat bahwa dengan adanya kebijakan pertambangan, usaha pertambangan di Desa Gunung Wetan selalu ada, baik dimiliki oleh masyarakat asli desa maupun masyarakat dari luar desa yang membeli tanah di Desa Gunung Wetan.



**Gambar 3.** Dokumentasi Operasi Pertambangan Batuan Di Desa Gunung Wetan

Peluang usaha pertambangan di Desa Gunung Wetan dalam sektor pertambangan terlihat dari adanya suatu operasi pertambangan di desa. Usaha pertambangan batuan di Desa Gunung Wetan yang sudah tidak beroperasi sebanyak 7 titik dan untuk saat ini di tahun 2018, terdapat dua pertambangan di Desa Gunung Wetan yang beroperasi yaitu pertambangan UD. Naga Liar milik Sundiarjo Naswin dengan nomor IUP 543/3/2886/Tahun 2016 disahkan pada tanggal 15 April 2016 dengan jangka waktu 3 tahun, jenis pertambangannya adalah mineral batuan (basalt) dengan luas lahan 10 Ha dan pertambangan milik Kartono dengan nomor IUP 543.32/12551/2017 disahkan pada tanggal 22 November 2017 dengan jangka waktu 2,5 tahun, jenis pertambangannya adalah batuan (basalt) dengan luas lahan 5 Ha.<sup>35</sup>

Dengan adanya pertambangan tersebut, menjadi peluang berusaha bagi masyarakat Desa Gunung Wetan untuk dapat bekerja di sektor pertambangan. Sebanyak 59 masyarakat Desa Gunung Wetan menggunakan peluang tersebut untuk bekerja di sektor pertambangan. Peluang berusaha ini jika tidak dimanfaatkan dengan bijak akan menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Jika terlalu banyak lahan pasca tambang yang terdapat di Desa Gunung Wetan maka akan menimbulkan ketidakseimbangan alam seperti tanah tandus, kekeringan dan lainnya.







**Gambar 4.** Dokumentasi Lahan Pasca Tambang Di Desa Gunung Wetan

AMDAL yang seharusnya menganalisis dampak yang terjadi pada lingkungan akibat adanya aktivitas pertambangan, telah dilakukan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas dengan uang jaminan reklamasi sejumlah Rp 35.000.000,00. Namun sebaiknya, dalam menyelesaikan masalah tersebut, jangan hanya bergantung kepada Dinas terkait. Sebagai masyarakat harus cepat tanggap agar tanah pasca tambang terurus dengan bijak dan tidak terbengkalai. Bukan hanya sekedar nominal yang dijadikan tumpuan pengendalian dampak pada lingkungan, namun kesadaran berwawasan lingkungan perlu lahir di dalam masing-masing individu masyarakat Desa Gunung Wetan. Karena hal ini akan berdampak terhadap kehidupan jangka panjang masyarakat Desa Gunung Wetan jika dibiarkan terus menerus tanpa pengendalian yang kuat. Dampak yang telah tampak yaitu tanah pasca tambang dibiarkan terbengkalai tanpa digunakan untuk menanam kembali dan juga kekeringan air telah terjadi di desa. Khususnya kekeringan pada sungai yang ada di sepanjang jalur operasi pertambangan. Hal ini akan berdampak kepada kehidupan masyarakat di masa yang akan datang.



**Gambar 5.** Dokumentasi Aliran Sungai Kecil Di Pertambangan Batuan

Bukan hanya pengendalian dampak lingkungan saja yang dilakukan, tetapi juga bagaimana cara desa mengolah sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa secara merata. Yaitu sumber daya tersebut dikelola oleh desa sendiri melalui BUMDES misalnya, dimana yang hasilnya akan kembali kepada desa dan lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa ada eksploitasi yang berlebihan pada sistem pencarian *profit* oleh pihak tertentu. Karena memang kekayaan alam merupakan hak milik desa yang sesungguhnya, yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya guna kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Wetan.

## 2. Peningkatan Pendapatan

Masyarakat Desa Gunung Wetan masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Pendapatan rumah tangga di sektor pertanian hanya sesuai dengan musim tanam dan panen saja yaitu pendapatan petani sesuai dengan hasil panen yang di dapatkan saat sudah dijual kepada tengkulak. Sedangkan pendapatan buruh tani sebesar Rp 70.000,00 per hari dan sampai Rp 100.000,00 per hari jika bekerja secara borongan. Pendapatan ini pun tidak dapat setiap harinya diperoleh, karena pekerjaan sebagai buruh tani tergantung pada pemilik lahan yang akan memperkerjakannya. Jika tidak ada pekerjaan, maka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan.

Dengan adanya pertambangan, 59 buruh tani yang beralih pekerjaan di sektor pertambangan dapat meningkatkan pendapatannya. Pendapatan di sektor pertambangan dapat diperoleh sesuai dengan waktu beroperasinya pertambangan. Pertambangan beroperasi setiap hari dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Pendapatan yang diperoleh oleh para buruh tambang yaitu beragam dari pendapatan buruh bongkar muat sejumlah Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 per hari, pendapatan buruh pemecah batu sejumlah Rp 70.000,00 sampai Rp 210.000,00 per hari dan pendapatan operator sejumlah Rp 10.000,00 per jam. Untuk operator bekerja setiap harinya 8 jam per hari jadi total pendapatan operator per hari adalah Rp 80.000,00.

Seperti apa yang dikemukakan oleh para pekerja tambang, bahwa dengan adanya pertambangan di Desa Gunung Wetan dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Khususnya para buruh tani yang bekerja hanya menunggu musim tanam dan panen saja. Dengan adanya pertambangan tersebut, dapat membantu para buruh tani dalam meningkatkan pendapatan. Pendapatan sebagai buruh tani hanya mendapatkan Rp 70.000,00 per hari dan itu saja hanya musim-musim tertentu. Tetapi di sektor pertambangan, dapat meningkatkan pendapatan. Di sektor pertambangan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 sebagai buruh bongkar muat. Pekerjaan di pertambangan selalu ada setiap harinya sesuai dengan jam beroperasinya pertambangan. Di pertambangan, setidaknya setiap harinya dapat memiliki pendapatan Rp 30.000,00 per hari jika penjualannya sepi. Paling tidak dapat menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari daripada di sektor pertanian yang tidak menentu bekerja tiap harinya.<sup>36</sup>

Selain memanfaatkan pertambangan di Desa Gunung Wetan, masyarakat desa juga memanfaatkan pertambangan milik desa lain yang

---

<sup>36</sup> Olahan data primer, wawancara dengan pekerja tambang Desa Gunung Wetan, bulan Mei 2018.



berbatasan dengan Desa Gunung Wetan. Pertambangan tersebut berjumlah 3 titik usaha pertambangan yang melalui jalur transportasi desa Gunung Wetan. Masyarakat juga dapat bekerja di pertambangan daerah lain karena tempatnya yang sangat dekat dengan perbatasan desa Gunung Wetan. Hal ini juga sangat membantu untuk mengurangi pengangguran di desa Gunung Wetan. Pendapatan di sektor pertambangan juga melebihi gaji UMR Kabupaten Banyumas, karena pendapatan di sektor pertambangan per hari Rp 140.000,00 sebagai buruh pemecah batu. Jika pendapatan ini dikalikan sebulan maka sejumlah Rp 4.200.000,00.<sup>37</sup>

Metode pemberian gaji kepada pekerja buruh tambang yaitu dengan sistem gaji hasil penjualan. Jadi para supir dump truck yang datang ke pertambangan, membeli batuan kepada para buruh pemecah batu seharga Rp 400.000,00 per dump truck. Dengan hasil tersebut, para buruh pemecah batu memberikan hasil penjualannya kepada pengusaha tambang sebesar Rp 330.000,00 dan sebesar Rp 70.000,00 untuk dirinya sendiri. Pajak pengusaha tambang kepada Kabupaten Rp 5.000,00 – Rp 8.000,00 per ton. Sedangkan untuk buruh bongkar muat mendapat upah kerja dari supir dump trucknya sendiri. Satu muatan dihargai Rp 100.000,00. Jika buruh tersebut mampu menyelesaikan muatan itu sendirian maka Rp 100.000,00 dapat dinikmati oleh dirinya sendiri. Namun jika tidak, maka upah tersebut dibagi dengan yang lain. Umumnya satu muatan dikerjakan oleh dua sampai tiga orang permuatan.

Melihat dari keadaan yang seperti ini dikhawatirkan akan menyebabkan kesenjangan pendapatan bagi para pekerja buruh. Alangkah lebih baiknya, jika sistem pemberian gaji diberikan secara tetap di setiap bulan dengan sistem UMR dan penambahan gaji jika ada kerja lembur. Hal ini akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan buruh dalam sistem upah yang berprinsip adil dan merata.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Kidam, *Kepala Desa Gunung Wetan*, tanggal 25 April 2017 pukul 16.00 WIB.

### 3. Perubahan Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Gunung Wetan awalnya hanya sebagai petani dan buruh tani yang memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebanyak 80,28% masyarakat Desa Gunung Wetan dalam memenuhi kebutuhannya bergantung pada alam, yaitu 44,43% sebagai petani dan 35,85% sebagai buruh tani.<sup>38</sup> Hasil pertanian yang diperoleh oleh masyarakat Desa Gunung Wetan hanya dijadikan sumber pangan setiap harinya. Tak ada pekerjaan lain di desa yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang kerja. Mereka hanya memanfaatkan hasil alam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan adanya kebijakan pertambangan, Desa Gunung Wetan mendapatkan izin usaha pertambangan oleh pemerintah. Usaha pertambangan di Desa Gunung Wetan dapat dirasakan dampaknya terhadap masyarakat Desa Gunung Wetan dalam aspek mata pencahariannya. Sebanyak 59 masyarakat Desa Gunung Wetan, tercatat dalam monografi kecamatan Jatilawang yang bekerja di sektor pertambangan. 59 Pekerja tambang tersebut merupakan masyarakat desa Gunung Wetan yang awalnya bermata pencaharian sebagai buruh tani.

Seperti apa yang dikemukakan oleh para pekerja tambang di desa Gunung Wetan, bahwa mereka melakukan perubahan pada mata pencahariannya dari sektor pertanian ke sektor pertambangan dengan alasan bahwa bekerja di sektor pertanian hanya mengandalkan waktu-waktu tertentu saja yaitu pada musim tanam dan panen dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya. Pekerjaan di sektor pertanian tergantung ada tidaknya yang memberi pekerjaan tersebut. Pertambangan dapat dimanfaatkan sebagai peluang kerja di desa karena sempitnya lapangan pekerjaan di desa. Dengan bekerja di sektor

---

<sup>38</sup> Data Kependudukan Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang 2017.

pertambangan juga dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.<sup>39</sup>

Sistem pekerjaan di pertambangan tidak memiliki sistem kerja kontrak. Mereka bekerja tidak melalui lamaran maupun seleksi kerja. Pertambangan tersebut diberlakukan bebas untuk siapa saja yang ingin bekerja di sektor pertambangan. Alangkah baiknya, pekerjaan di sektor pertambangan harus memiliki sistem kerja kontrak agar pendapatan yang diperoleh merata dan tidak berlebihan pekerja di sektor pertambangan. Jika sistem kerja kontrak telah ada, maka hal ini akan menimbulkan biaya input dan output perusahaan seimbang tanpa ada perbedaan di faktor produksi.

#### 4. Perubahan Pola Perilaku Masyarakat dan Konflik

Adanya perubahan pola perilaku pada masyarakat yang beralih pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor pertambangan. Dalam sektor pertanian, mereka tidak hanya mencerminkan sistem ekonominya melainkan juga mencerminkan sistem nilai, norma-norma sosial atau tradisi, adat istiadat serta aspek-aspek kebudayaan lainnya. Hal inilah yang membentuk pola kerja di sektor pertanian lebih mementingkan kerja sama, gotong royong dan bersifat akrab satu sama lainnya.

Dengan adanya pertambangan menjadikan mentalitas masyarakat yang lebih cenderung individualistis, materialistis, dan meningkatnya semangat pekerja. Karena pekerjaan di sektor pertambangan berorientasi pada upah yang didapatkan sendiri tidak ada konsep kerjasama di dalamnya. Konflikpun terjadi akibat adanya pertentangan antar masyarakat mengenai beroperasinya suatu usaha pertambangan. Mereka memiliki persepsi yang berbeda dengan adanya pertambangan di Desa Gunung Wetan, ada yang pro dan kontra terhadap usaha pertambangan. Hal inilah yang dapat memicu adanya perubahan pola perilaku masyarakat karena terjadinya konflik yang berasal dari perbedaan persepsi.

---

<sup>39</sup> Olahan data primer, wawancara dengan pekerja tambang Desa Gunung Wetan, bulan Mei 2018.

Bukan hanya itu, pertambangan juga memberikan dampak yang positif bagi pola perilaku masyarakat. Sebelum adanya pertambangan, masyarakat desa terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan rela mencuri kayu di perhutani atau hutan negara. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang berurusan dengan pihak berwajib. Namun setelah adanya pertambangan, masyarakat desa Gunung Wetan, demi memenuhi kebutuhan hidup mereka dapat bekerja di sektor pertambangan dari pada mencuri kayu di hutan untuk dijual kembali.<sup>40</sup>

Adanya solidaritas dalam perkumpulan di suatu masyarakat juga perlu dibentuk. Contohnya perkumpulan masyarakat tani yaitu GAPOKTAN dan perkumpulan masyarakat sadar wisata yaitu POKDARWIS, maka di Desa Gunung Wetan juga perlu untuk membentuk kelompok pekerja di sektor pertambangan. Hal ini untuk menjaga pola perilaku masyarakat Desa Gunung Wetan dalam jangka panjang dan juga untuk mencegah terjadinya konflik yang terjadi jika terdapat kesenjangan yang mungkin akan timbul di sektor tersebut. Dengan perkumpulan atau komunitas tersebut, maka akan menjadikan tingkat kesejahteraan buruh akan lebih terlihat dan terlindungi jika seandainya terdapat kesenjangan yang terjadi.

##### 5. Taraf Hidup

Taraf hidup sama halnya dengan standar hidup seseorang di dalam kehidupan masyarakat. Taraf hidup dapat diukur melalui status apa yang ia peroleh. Status merupakan kedudukan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Mayoritas masyarakat Desa Gunung Wetan sebelum adanya usaha pertambangan beroperasi mereka berstatus petani maupun buruh tani yang selalu memanfaatkan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai mata pencaharian utama masyarakat Desa Gunung Wetan. Taraf hidup masyarakat Desa Gunung Wetan masih dikatakan rendah karena bekerja di sektor pertanian tidak

---

<sup>40</sup> Olahan data primer, wawancara dengan pekerja tambang Desa Gunung Wetan, bulan Mei 2018.

harus memiliki keahlian khusus di dalamnya. Kebiasaan atau gaya hidup masyarakat juga masih primitif dan belum berpengaruh dunia luar karena memang belum ada warga pendatang yang masuk ke dalam desa. Penghasilan di sektor pertanian yang masih rendah, hal ini juga berdampak terhadap taraf hidup masyarakat Desa Gunung Wetan.

Setelah adanya pertambangan di desa, mendorong masyarakat Desa Gunung Wetan untuk mampu bersaing secara kompeten dalam meningkatkan taraf hidupnya. Mereka bersaing secara sehat untuk menaikkan taraf hidup mereka. Mereka tak ingin selalu bergantung di sektor pertanian. Dengan bekerja di sektor pertambangan, 59 masyarakat Desa Gunung Wetan yang beralih pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor pertambangan dapat meningkatkan taraf hidupnya pada aspek pendapatan. Karna yang semula pendapatan mereka hanya bergantung pada faktor alam yang dominan, dengan adanya kebijakan pertambangan mereka dapat memperoleh pendapatan setiap harinya tanpa terpengaruh oleh waktu.<sup>41</sup>

Menurut penulis, terdapat adanya kesenjangan pendapatan yang terjadi di sektor pertambangan. Sebaiknya para pekerja tambang bekerja secara sistem kontrak dan memiliki pendapatan standar UMR Banyumas, agar mereka dapat memiliki pendapatan yang tetap stabil per bulan. Hal ini lebih tepat untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.

#### 6. Mobilitas Penduduk

Masyarakat Desa Gunung Wetan melakukan mobilitas dalam hal pekerjaan. Mobilitas sama halnya dengan perpindahan status atau kedudukan seseorang. Pada awalnya, 59 orang yang berstatus pekerjaan sebagai buruh tani selalu bergulat dengan keadaan yang ada. Di dalam sektor pertanian tidak ada pembagian keterampilan kerja. Suatu pekerjaan di sektor pertanian hanya ada dua pelapisan kedudukan seseorang, yaitu pemilik lahan dan pekerja. Pekerja tidak akan mengalami mobilitas pekerjaan di sektor pertanian karena memang pada sektor tersebut tidak

---

<sup>41</sup> Olahan data primer, wawancara dengan pekerja tambang Desa Gunung Wetan, bulan Mei 2018.

memiliki pembagian kerja dan sifatnya tergantung dari lapisan kedudukan seseorang yang dilihat dari kepemilikan lahan.

Setelah Desa Gunung Wetan menerapkan kebijakan pertambangan bahwa pertambangan dapat didirikan di suatu daerah jika daerah tersebut memiliki potensi bahan tambang, maka Desa Gunung Wetan memiliki usaha pertambangan. Dengan usaha ini, 59 masyarakat Desa Gunung Wetan yang bekerja hanya sebagai buruh tani dapat melakukan mobilitas dalam hal pekerjaan di desa. Pada awalnya di desa hanya bekerja di sektor pertanian dengan penghasilan yang tidak menentu tiap harinya, namun dengan adanya pertambangan dapat menjadi peluang untuk melakukan mobilitas pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor pertambangan. Pekerjaan di sektor pertambangan lebih layak karena pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup dan merubah taraf hidup pekerja dalam hal pendapatan.<sup>42</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>42</sup> Olahan data primer, wawancara dengan pekerja tambang Desa Gunung Wetan, bulan Mei 2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai dampak kebijakan pertambangan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertambangan telah memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif, khususnya dalam aspek sosial ekonomi. Sebanyak 59 masyarakat desa Gunung Wetan merubah mata pencahariannya, yang awalnya bekerja di sektor pertanian menjadi bekerja di sektor pertambangan. Hal ini berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial ekonomi mereka. Dengan adanya kebijakan pertambangan memberikan peluang berusaha yang positif bagi mereka. Karena dengan kebijakan tersebut mengakibatkan desa Gunung Wetan memiliki izin untuk dapat mendirikan usaha pertambangan di desa yang dapat dimanfaatkan oleh mereka dalam bekerja.

Jika di sektor pertanian yang hanya mendapatkan pendapatan sesuai hasil pertanian atau dapat sebesar Rp 70.000,00 sampai Rp 100.000,00 per hari pada musim tanam dan panen saja. Sedangkan pendapatan di sektor pertambangan dapat diperoleh oleh para buruh tambang setiap hari yaitu pendapatan buruh bongkar muat sejumlah Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 per hari, pendapatan buruh pemecah batu sejumlah Rp 70.000,00 sampai Rp 210.000,00 per hari dan pendapatan operator sejumlah Rp 10.000,00 per jam. Untuk operator bekerja setiap harinya 8 jam per hari jadi total pendapatan operator per hari adalah Rp 80.000,00.

Masyarakat desa Gunung Wetan yang bekerja di sektor pertanian yang telah melakukan mobilitas pekerjaan ke sektor pertambangan, hal ini juga mengakibatkan meningkatkannya taraf hidup mereka dari aspek pendapatan. Karena yang semula pendapatan mereka hanya bergantung pada faktor alam yang dominan dan menyebabkan pengangguran, maka dengan adanya



kebijakan pertambangan masyarakat dapat memperoleh pendapatan tanpa menunggu waktu musim tanam dan panen.

Bukan hanya itu, kebijakan pertambangan juga mengakibatkan usaha pertambangan di desa Gunung Wetan selalu ada, baik dimiliki oleh masyarakat asli desa Gunung Wetan maupun masyarakat dari luar desa Gunung Wetan yang membeli tanah di desa. Hal ini berdampak terhadap pola kerjasama dan pola perilaku masyarakat desa Gunung Wetan yaitu timbulnya mentalitas masyarakat yang lebih cenderung individualistis, materialistis, dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat seperti mudarnya gotong royong dan kerjasama di antara masyarakat. Karena di sektor pertambangan berorientasi pada upah yang didapatkan sehingga menimbulkan konflik karena adanya perbedaan persepsi antar masyarakat mengenai usaha pertambangan di desa. Terjadinya krisis air, terbengkalainya lahan pasca tambang, kekeringan, kesenjangan pendapatan dan konflik merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pertambangan di desa.

## **B. Saran**

Dengan adanya kebijakan pertambangan, desa Gunung Wetan memiliki usaha pertambangan yang di lindungi oleh hukum dan dapat memanfaatkan potensi alam yang ada secara optimal. Namun kebijakan ini telah menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi secara positif maupun negatif. Positifnya, masyarakat dapat memiliki pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatannya, sedangkan negatifnya yaitu berdampak terhadap keseimbangan alam dan masyarakat mengalami perubahan-perubahan sosial seperti pola kerja sama, pola perilaku dan lainnya. Bukan hanya itu, adanya kesenjangan pendapatan dan tidak meratanya kesejahteraan buruh pun juga terjadi.

Melihat hal yang demikian, maka selain adanya kebijakan pertambangan dari pemerintah pusat, sebaiknya pemerintah Desa Gunung Wetan juga memberikan kebijakan khusus terhadap usaha pertambangan agar dapat memberikan kontribusi kepada desa dan masyarakat secara optimal



tanpa dapat menimbulkan konflik. Bukan hanya itu, sebaiknya juga ada peraturan tegas terhadap lahan bekas tambang yang dibiarkan terbengkalai untuk dapat dilakukan reklamasi. Hal ini sangat berguna untuk kelangsungan lahan agar menjadi produktif dan dapat dimanfaatkan kembali hasilnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Abidin, Zainal dan Agus Ahmad Safe'i. 2002. *Sosiophologi: Sosiologi Islam Berbasis Hikmah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Amiruddin dan Aderito Jesus de Soares. 2003. *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*. Jakarta: ELSAM.
- Amrinald, Rival, Slamet Rianto dan Yuherma. *Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Bagi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Aliran Batang Bayang Kecamatan Bayang*. Jurnal STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Apriyanto, Dedek dan Rika Harini. 2013. *Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggara, Kutai Kartanegara*. Jurnal Bumi Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Fathul Aminudin. 2012. *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bashith, Abdul. 2012. *Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang, UIN-MALIKA PRESS (Anggota IKAPI).
- Basrowi dan Siti Juariyah. 2010. *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sri Gading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, volume 7 Nomor 1.
- Dewi, Nurma Kumala dan Iwan Rudiarto, "Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota.
- Fadhil, Fachri. 2017. *skripsi "Pengaruh Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan"*. Kendari: Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan Universitas Halu Oleo.

- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gazali, Ahmad. 1996. *Menuju Masyarakat Industri Yang Islami*. Jakarta: PT: Nimas Multima.
- Gustan, Oktaviana. 2012. *skripsi "Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di RT 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara"*. Samarinda: Jurusan Manajemen Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research jilid II*. Yogyakarta: Andi.
- Hakim, Ilmi. 2015. *Dampak Kebijakan Pertambangan Batubara Bagi Masyarakat Bengkuriang Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara*. eJournal IP FISIP-UNMUL.
- Hijriati, Emma dan Rina Mardiana. "Pengaruh ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhan Sukabumi". *Jurnal Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB ISSN : 2302-7517, VOL.02, No.03*.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- HS, Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Erlangga.
- Martono, Nanang. 2016. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Naf'an. 2014. *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Narwoko, J. Dwi. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Harun. 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Putong, Iskandar. 2013. *Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rais, Heppy El. 2012. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratnasari, Jesi, dkk.,. "Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi di SMA". e-Journal Pendidikan Ekonomi FKIP Untan.
- Risal, Samuel dan DB. Paranoan. 2013. *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman*. eJournal Administrative Reform, ISSN 0000-0000, 1 (1):117-131.
- Setiadi, Elly M, Kama Abdul Hakam dan Ridwan Effendi. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung:Refika Aditama.
- Soejono dan Abdurrohman. 1997. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soelaeman, M. Munandar. 1993. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT Eresco.
- Sugihen, Bahrein T. 1996. *Sosiologi Pedesaan suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarwoto, Otto. 1990. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. 1990. *Metodologi Penelitian*, Cet V. Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (PERS).

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

[www.beritagar.id](http://www.beritagar.id)

[www.esdm.banyumaskab.go.id](http://www.esdm.banyumaskab.go.id)

Yuliati, Yayuk dan Mangku Poernomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

